LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 17 TAHUN 2010 SERI : E NOMOR : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

29. Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1999 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tangah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sampai dengan Tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPJM Daerah disusun sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. BAB III : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
e. BAB V : Skenario Pengembangan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
f. BAB VI : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
g. BAB VII : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
h. BAB VIII : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
i. BAB IX : Penutup

Pasal 4

RPJM Daerah beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJM Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Pasal 6

RPJM Daerah menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan Tahun 2015.

Pasal 7

RPJM Daerah wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJM Daerah Tahun 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015 dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi, sebagai pedoman penyusunan

RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJM Daerah periode selanjutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Desember 2010

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KEBUPATEN KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KEBUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2015

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, yang disusun dalam periodisasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana-rencana kegiatan yang bersifat indikatif serta penetapan indikator kinerja daerah.

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2010
TANGGAL 9 DESEMBER 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pembangunan daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJM Daerah.

Dalam menyusun RPJM Daerah tersebut, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen pada masa kampanye pemilihan Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen

Tahun 2010. Di samping itu, penyusunan RPJM Daerah ini juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJM Daerah ini mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

C. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 tidak terlepas dari hierarki

perencanaan pembangunan Nasional dan memperhatikan dokumen perencanaan yang terkait baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pemangku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan acuan pembangunan jangka panjang nasional yang dipergunakan sebagai acuan pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh)

tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional Tahun 2005-2025 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur".

Mandiri : Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju : Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Adil : Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur : Kemudian Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat

memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Visi tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) misi antara lain:

a. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
b. Mewujukan bangsa yang berdaya saing tinggi;
c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
d. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;
e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
f. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
g. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap

pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok untuk mencapai visi dan misi pembangunan tersebut. Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Setiap sasaran pokok dalam 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. RPJM Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 menjadi bagian dari tahapan kedua dan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

2. RPJM Nasional Tahun 2010-2014

Penyusunan RPJM Daerah Kebupaten Kebumen Tahun 2010-2015 memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Kebijakan, program dan prioritas

pembangunan jangka menengah Nasional yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah dapat dilaksanakan di Kabupaten Kebumen menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

Visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan".

Kesejahteraan Rakyat	:	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Demokrasi	:	Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Visi jangka menengah nasional tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi antara lain :

a. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera;
b. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; dan
c. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2010-2014, ditetapkan 5 (lima) agenda utama pembangunan nasional Tahun 2010-2014, yaitu :

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;
Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi;
Agenda IV : Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan
Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 adalah “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
b. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
c. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;

d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;

e. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan

f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

4. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, di mana sinergitas pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan.

Visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 adalah

"Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah
yang Semakin Sejahtera".

Peningkatan kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008-2013, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 antara lain :

a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat;

b. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan industri padat karya;

c. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal;

d. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan;

e. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur; dan

f. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025

RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 merupakan tahapan 5 (lima) tahunan kedua, mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 adalah “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”.

Pada tataran yang lebih operasional, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut perlu ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
b. Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk;
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis;
d. Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan; dan
e. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.

Sebagai ukuran tercapainya Kebumen mandiri dan sejahtera, pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

a. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:
    1) meningkatnya indeks pembangunan manusia;
    2) meningkatnya indeks pembangunan gender;
    3) terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; dan
    4) terbentuknya karakter budaya (jati diri) masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Berkurangnya tingkat kemiskinan penduduk yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:
    1) terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin;
    2) meningkatnya tingkat pendapatan penduduk miskin;
    3) meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi penduduk miskin; dan

4) meningkatnya harkat hidup dan martabat penduduk miskin.

c. Terwujudnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

1) terwujudnya ketersediaan sumber daya air yang handal untuk irigasi yang didukung kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
2) terwujudnya sistem transportasi yang handal yang didukung oleh prasarana dan sarana termasuk jalan dan jembatan;
3) terwujudnya ketersediaan telekomunikasi dan informatika yang handal untuk pelayanan publik termasuk mendukung pelaksanaan *e Gorvernment* (penyelenggaran pemerintahan secara elektronik);
4) terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik termasuk pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan;
5) terwujudnya ketersediaan energi bagi masyarakat yang didukung oleh pengembangan energi alternatif;

6) terwujudnya penataan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh untuk pemerataan dan penyerasian pembangunan wilyah; dan
7) terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan yang didukung peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih di perkotaan dan perdesaan.

d. Tercapainya agrobisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
1) meningkat dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang berbasis pada agrobisnis yang mendorong pendapatan perkapita, sehingga dapat bersaing dan menjadi yang terdepan diantara beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah;
2) meningkatnya keunggulan sektor pertanian yang kompetitif, yang membentuk struktur perekonomian daerah dengan dukungan beberapa sektor lain seperti perdagangan,

industri, dan pariwisata yang memiliki daya saing kuat di pasar nasional dan internasional;

3) terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bermutu aman hingga tingkat masyarakat terbawah didukung oleh swasembada pangan dan kestabilan harga pangan;
4) meningkatnya kegiatan agrobisnis yang ditopang oleh sektor perdagangan dan industri serta jasa pariwisata khususnya wilayah perdesaan; dan
5) meningkatnya diversifikasi jenis-jenis agrobisnis yang berasal dari produk pertanian untuk menjamin keberlangsungan produk dan aksesibilitas pasar nasional dan internasional.

e. Tercapainya prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

1) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan

pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel;

2) meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur, serta kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, efisien dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik berlandaskan hukum;
4) meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah;
5) meningkatnya kepekaan dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik;
6) meningkatnya kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dengan berbagi pihak pada tingkat lokal/regional, nasional dan internasional; dan

7) meningkatnya komitmen Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Isi pokok Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, menjabarkan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan penetapan kawasan strategis wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi meliputi :

a. sistem perdesaan;
b. sistem perkotaan;
c. sistem perwilayahan; dan
d. sistem jaringan prasarana wilayah.

Kemudian rencana pola ruang wilayah Provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah terbagi atas :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2027

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2027 menjadi salah satu acuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 terutama dalam implikasi kebijakan dan

program pembangunan ke dalam konteks ruang dan wilayah.

Kebijakan pengembangan dan pembangunan tata ruang di Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Kebumen. Dalam struktur tata jenjang pusat-pusat pelayanan daerah, di setiap pusat pengembangan membawahi beberapa pusat kawasan pengembangan dan berfungsi melayani kawasan di sekitarnya sebagai daerah belakang (*hinterland*) terutama yang mempunyai mekanisme perekonomian yang sama. Dengan demikian pusat kawasan pengembangan akan berorentasi pada pusat wilayah pengembangan sehingga akan membentuk suatu struktur tata ruang yang kompak dan dinamis. Pembagian Satuan Wilayah Pembangunan Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

a. Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangan di kota Kebumen;
b. Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusat pengembangan di kota Gombong.

Berdasarkan skalagram ketersediaan sarana dan prasarana dan analisis kemampuan gravitasi penduduk perkecamatan, untuk pengembangan kawasan yang lebih kecil maka Sub Wilayah Pembangunan tersebut dibagi dalam beberapa Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Hal ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi sektor yang menonjol atau potensial. Pembagian Sub Wilayah Pembangunan menjadi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) tersebut adalah sebagai berikut :

SWP I : Meliputi wilayah Kecamatan Kebumen, Sadang, Alian, Sruweng, Pejagoan dan Buluspesantren dengan pusatnya di Kota Kebumen. Sektor utama yang dikembangkan ; perdagangan, industri, pertanian, pariwisata, pengembangan geologi Karangsambung;

SWP II : Meliputi wilayah Kecamatan Gombong, Sempor, Kuwarasan dan Buayan dengan pusatnya di Kota Gombong. Sektor utama yang dikembangkan: industri, pertanian, perdagangan dan pariwisata;

SWP III : Meliputi wilayah Kecamatan Kutowinangun dan Ambal dengan pusatnya di Kota

Kutowinangun. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian dan perdagangan;

SWP IV : Meliputi wilayah Kecamatan Prembun dan Mirit dengan pusatnya di kota Prembun. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian, pariwisata dan perdagangan;

SWP V : Meliputi wilayah Kecamatan Petanahan, Puring dan Klirong dengan pusatnya di kota Petanahan. Sektor utama yang dikembangkan: pertanian, pariwisata dan perdagangan;

SWP VI : Meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar, Karanggayam dan Adimulyo dengan pusatnya di kota Karanganyar. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian dan perdagangan;

SWP VII: Meliputi wilayah Kecamatan Ayah dan Rowokele dengan pusatnya di kota Ayah. Sektor utama yang dikembangkan pertanian, perindustrian, perikanan dan pariwisata.

Dilihat dari perspektif struktur tata ruang wilayah dan sektor utama yang dikembangkan, tampak bahwa potensi pertanian dimiliki oleh semua wilayah/kecamatan, sehingga menjadi fokus pengembangan pada semua

satuan wilayah pengembangan. Sedangkan sektor unggulan berikutnya adalah perdagangan dan pariwisata ada di 6 (enam) satuan wilayah pengembangan, sedangkan sektor perikanan ada di 1 (satu) satuan wilayah pengembangan dan industri yang masing-masing dikembangkan di 3 (tiga) satuan wilayah pengembangan. Ditinjau dari struktur wilayah, masih terdapat ketimpangan pelayanan antara Satuan Wilayah Pembangunan I dan II.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

   Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penjabaran dari Visi, Misi dan Arah Kebijakan pembangunan Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 ini memuat visi, misi, strategi dan prioritas program pembangunan yang dalam penyusunannya dilakukan secara

partisipatif, teknokratis dan politis dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

D. Sistematika

RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika serta maksud dan tujuan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan kondisi geografis, perekonomian, sosial budaya, prasarana dan sarana serta kondisi pemerintahan daerah.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah serta kebijakan umum anggaran.

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal serta isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015.

BAB V : SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Menguraikan skenario rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah Kabupaten Kebumen.

BAB VI : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2010-2015.

BAB VII : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan strategis pembangunan daerah, arahan umum

pembangunan jangka menengah sesuai kebijakan dan program Bupati, serta program pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015.

BAB VIII : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Menguraikan indikator kinerja menurut urusan Pemerintah Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengampu.

BAB IX : PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

E. Maksud dan Tujuan

RPJM Daerah disusun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan akan berjalan efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJM Daerah antara lain:

1. Menetapkan visi, misi dan strategi pembangunan jangka menengah daerah;
2. memberikan pedoman resmi dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah, serta pedoman bagi pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Kondisi Geografis dan Demografi

1. Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 (seratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas) hektar atau 1.281,115

(seribu dua ratus delapan puluh satu koma seratus lima belas) kilometer persegi.

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudra Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan juga terdapat wilayah pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 sampai dengan 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) meter di atas permukaan laut.

Beberapa wilayah Kabupaten Kebumen merupakan daerah pantai dan pegunungan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada Tahun 2009

tercatat 39.768 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar atau sekitar 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) adalah lahan sawah dan 88.343,50 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga koma lima puluh) hektar atau 68,96% (enam puluh delapan koma sembilan puluh enam persen) adalah lahan kering.

c. Penggunaan Lahan

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis yaitu 46,18% (empat puluh enam koma delapan belas persen) atau seluas 26.429 (dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektar dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan sebesar 33,82% (tiga puluh tiga koma delapan puluh dua persen) atau seluas 13.339 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar yang di beberapa tempat dapat ditanami 2 (dua) kali dalam setahun, serta 11,25 (sebelas koma dua puluh lima persen) lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. Sedangkan lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 35.985 (tiga puluh lima ribu

sembilan ratus delapan puluh lima) hektar atau 40,73% (empat puluh koma tujuh puluh tiga persen), tegalan/kebun seluas 28.777 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) hektar atau 32,57% (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh persen) serta hutan negara seluas 16.861 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh satu) hektar atau 19,09% (sembilan belas koma nol sembilan persen) dan sisanya digunakan untuk padang penggembalaan, tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan, serta lahan yang sementara tidak diusahakan dan tanah lainnya.

Luas hutan di Kabupaten kebumen selama kurun waktu 2004-2007 bertambah dari 39.856,70 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh) hektar pada Tahun 2004 menjadi 39.958,83 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tiga) hektar. Luasan tersebut terdiri dari Hutan milik Perhutani seluas 17.658,83 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tiga) hektar dan Hutan Rakyat seluas 22.300 (dua puluh dua ribu tiga ratus) hektar. Hutan seluas 17.658,83

(tujuh belas ribu enam ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tiga) hektar, terdiri atas hutan lindung 4.157,59 (empat ribu seratus lima puluh tujuh koma lima puluh sembilan) hektar, hutan produksi tetap 489,89 (empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) hektar, hutan produksi terbatas 12.909,22 (dua belas ribu sembilan ratus sembilan koma dua puluh dua) hektar, hutan bakau 35,99 (tiga puluh lima koma sembilan puluh sembilan) hektar dan hutan rakyat 66,14 (enam puluh enam koma empat belas) hektar.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kebumen merupakan wilayah di Pantai Selatan Jawa Tengah dengan potensi perikanan dan kelautan yang selama ini terus diupayakan dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan luas laut 68.670,5 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh koma lima) hektar dengan potensi budidaya 2.104,84 (dua ribu seratus empat koma delapan empat) hektar, panjang pantai 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) kilometer yang terbentang sepanjang 8 (delapan)

kecamatan, beberapa hal yang dapat dikembangkan dari potensi pesisir dan kelautan Kabupaten Kebumen antara lain :

a. pemanfaatan lahan untuk pembuatan garam rakyat;
b. pemanfaatan energi listrik tenaga angin;
c. pengembangan perikanan tangkap;
d. pengembangan perikanan budidaya laut dan pengolahan hasil laut;
e. usaha penangkapan ikan wilayah pantai;
f. usaha penangkapan ikan lepas pantai; dan
g. pengembangan obyek wisata bahari.

3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah, dengan perincian daerah rawan tanah longsor terdiri dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) desa di 12 (dua belas) kecamatan, rawan bencana banjir 190 (seratus sembilan puluh) desa di 12 (dua belas) kecamatan, serta daerah rawan kekeringan di 85 (delapan puluh lima) desa di 14 (empat belas) kecamatan. Sedangkan daerah yang berpotensi tsunami ada di 34 (tiga puluh empat) desa di 8 (delapan) kecamatan.

Tabel 2.1. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kebumen

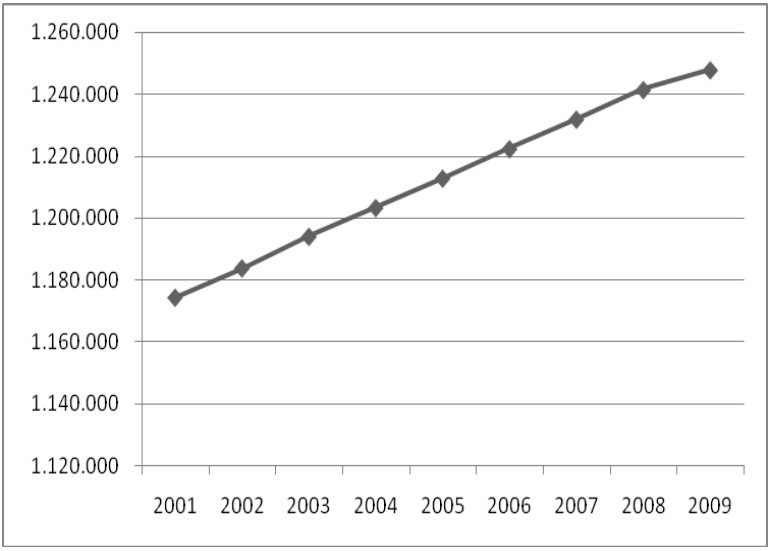
TANAH LONGSOR	BANJIR	KEKERINGAN	TSUNAMI
Rowokele	Pejagoan	Poncowarno	Ayah
Sempor	Petanahan	Padureso	Buayan
Ayah	Adimulyo	Alian	Puring
Buayan	Kuwarasan	Karangsambung	Petanahan
Karanggayam	Kebumen	Pejagoan	Klirong
Karanganyar	Buluspesantren	Karanggayam	Buluspesantren
Pejagoan	Mirit	Sadang	Ambal
Sruweng	Ambal	Karanganyar	Mirit
Karangasambung	Bonorowo	Sempor	
Padureso	Kutowinangun	Ayah	
Alian	Prembun	Buayan	
Klirong	Klirong	Puring	
		Kutowinangun	
		Rowokele	
12 kecamatan	12 kecamatan	14 kecamatan	8 Kecamatan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, Tahun 2009

4. Demografi

Pertumbuhan penduduk selama Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2009 sebesar 6,26% (enam koma dua puluh enam persen) atau 0,7% (nol koma tujuh persen) per tahun, yaitu dari 1.174.306 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam) jiwa pada Tahun 2001 menjadi 1.247.811 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas) jiwa pada Tahun 2009.

Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2001-2009



Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Kebumen selama periode Tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan *Sex Ratio* berkisar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 102% (seratus dua persen) yang berarti jumlah laki-laki lebih banyak sekitar 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) dibanding jumlah wanita.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Kebumen Tahun 2009 cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000, di mana pertumbuhan ekonomi Tahun 2009 mencapai 5,57% (lima koma lima puluh tujuh persen), dengan angka inflasi 14,21% (empat belas koma dua puluh satu persen). Laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan 1,73% (satu koma tujuh puluh tiga persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, suku bunga perbankan masih berada pada level yang kondusif, sehingga masih mampu mendorong permintaan dan relasi kredit, baik untuk konsumsi masyarakat maupun investasi.

Adapun pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional Tahun 2007-2009 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 2.2. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2009

NO.	INDIKATOR	2007	2008	2009
1.	PDRB Kabupaten Kebumen			
	Atas dasar harga berlaku (Rp. Juta)	4.568.871	5.291.714	5.948.052
	Atas dasar harga konstan (Rp. Juta)	2.572.062	2.715.270	2.819.637
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
	Atas dasar harga konstan (%)	4,52	5,57	3,84
3.	PDRB Perkapita			
	Atas dasar harga berlaku (Rp.)	3.723.285	4.279.057	4.809.793
	Atas dasar harga konstan (Rp.)	2.096.037	2.195.658	2.280.052
4.	Inflasi (%)	6,24	14,21	5,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Struktur ekonomi suatu daerah terlihat dari distribusi sektoral masing-masing lapangan usaha. Pada Tahun 2009, Kabupaten Kebumen masih kental dengan nuansa agraris. Hal ini ditandai dengan dominasi oleh sektor pertanian di mana kontribusi sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Brutto berdasarkan harga konstan Tahun 2000 sebesar 37,63%

(tiga puluh tujuh koma enam puluh tiga persen), diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, masing-masing sebesar 20,75% (dua puluh koma tujuh puluh lima persen) dan 11,33% (sebelas koma tiga puluh tiga persen), seperti pada tabel 3.2 di bawah ini, di mana kecenderungan dominasi sektor pertanian, diprediksi akan berlanjut pada Tahun 2010 dan Tahun 2011.

Tabel 2.3. Distribusi Per Sektor PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2009
Atas Dasar Harga Konstan 2000

NO.	LAPANGAN USAHA	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	39,15	37,83	38,63	37,63
2.	Pertambangan dan Galian	6,61	6,55	6,82	6,88
3.	Industri Pengolahan	9,50	9,97	9,85	9,91
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,67	0,71	0,70	0,73
5.	Bangunan	4,61	4,34	4,03	3,76
6.	Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	11,48	11,38	11,36	11,33
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,36	4,42	4,46	4,52
8.	Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,70	4,70	4,55	4,51
9.	Jasa-jasa	19,57	20,10	19,60	20,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2006 hingga Tahun 2009, tidak terlihat adanya pergeseran struktur ekonomi, di mana sektor riil masih menjadi tumpuan pendapatan daerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perubahan struktural tidak terjadi. Meskipun demikian, meningkatnya persentase distribusi pada sektor industri membuktikan bahwa telah terjadi dasar peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern. Diharapkan dari perubahan sikap sosial dan motivasi yang ada dapat membawa perbaikan dalam kesempatan kerja, produktivitas, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi.

Sektor basis yang menjadi kekuatan Kabupaten Kebumen diperoleh dengan membandingkan distribusi lapangan usaha di Kabupaten Kebumen dengan Provinsi di mana Kabupaten Kebumen berada secara geografis.

Tabel 2.4. Sektor Basis Kabupaten Kebumen terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009

NO.	LAPANGAN USAHA	LQ			
		2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	1.77	1.84	1,91	1,94
2.	Pertambangan dan Galian	6.49	7.30	7,94	6,20
3.	Industri Pengolahan	0.30	0.27	0,28	0,31
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.98	0.92	0,82	0,83
5.	Bangunan	0.82	0.80	0,83	0,70
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.57	0.55	0,57	0,54
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0.92	0.88	0,84	0,86
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.48	1.46	1,41	1,23
9.	Jasa – jasa	2.03	1.99	1,81	1,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah Dalam Angka (data diolah)

Beberapa sektor di Kabupaten Kebumen secara konsisten memiliki nilai persentase distribusi yang lebih tinggi dari Provinsi. Sektor tersebut yaitu Pertanian; Pertambangan dan Galian; Keuangan; Persewaan dan Jasa. Dari keempat sektor tersebut, basis terkuat berada pada sektor Pertambangan dan Galian, hal ini cukup bisa dipahami, karena kekayaan bahan galian di Kabupaten Kebumen yang melimpah, sehingga daya tarik investasi pada sektor ini cukup tinggi. Namun mengingat bahan galian bukanlah sesuatu yang bersifat dapat diperbarui, maka perlu kajian khusus mengenai kesinambungan

pemanfaatan bahan galian tersebut dengan kelestarian alam.

Tabel 2.5. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2009 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO.	SEKTOR	PERTUMBUHAN (%)			
		2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	2,14	0,98	8,33	2,04
2.	Pertambangan dan Penggalian	12,78	6,88	9,87	4,75
3.	Industri Pengolahan	4,45	9,69	4,24	4,03
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	-0,03	10,05	4,02	8,10
5.	Bangunan	5,91	9,07	-1,95	-3,18
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,25	3,65	5,69	3,61
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,61	5,84	6,58	5,21
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,25	4,63	2,27	2,77
9.	Jasa-jasa	4,15	7,35	2,94	8,85
Total PDRB		4,08	4,52	5,80	3,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Berdasarkan harga konstan Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten Kebumen, pada Tahun 2009 terdapat 5 (lima) sektor yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan total Produk Domestik Regional Bruto yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik Gas dan Air Minum, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa-jasa.

Tabel 2.6. Model Rasio Pertumbuhan
Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2009

NO.	LAPANGAN USAHA	MRP			
		2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	0.63	0.93	0,97	0,32
2.	Pertambangan dan Galian	0.83	0.80	0,79	1,76
3.	Industri Pengolahan	0.98	0.57	(0,31)	1,42
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	(0.00)	0.31	0,96	2,42
5.	Bangunan	0.97	0.76	2,04	(0,69)
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.90	0.79	0,55	0,98
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0.66	0.82	0,68	0,99
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.50	0.88	0,68	0,50
9.	Jasa – jasa	0.53	0.86	0,75	1,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Dari nilai Model Rasio Pertumbuhan dan sektor basis Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan bahwa dalam periode Tahun 2006 dan 2007 tidak terdapat sektor unggulan, Tahun 2008 terdapat 1(satu) nilai Model Rasio Pertumbuhan yang di atas 1 (satu) yaitu sektor Bangunan dan Konstruksi, sedangkan Tahun 2009 terdapat 4 (empat) nilai Model Rasio Pertumbuhan yang berada pada angka di atas 1 (satu) yaitu Sektor Pertambangan dan Galian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta Sektor Jasa-Jasa.

2. Kesejahteraan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial penduduk Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin. Selama Tahun 2005-2009, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen terus mengalami penurunan, dari angka 349.300 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus) jiwa pada Tahun 2005 menjadi 309.610 (tiga ratus sembilan ribu enam ratus sepuluh) jiwa pada Tahun 2009. Demikian juga dengan persentasenya, turun dari angka 29,83% (dua puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) pada Tahun 2005 menjadi 25,73% (dua puluh lima koma tujuh puluh tiga persen) pada Tahun 2009. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2009

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	PERSENTASE
1.	2005	349.300	29.83%
2.	2006	388.700	32.49%
3.	2007	362.400	30.25%
4.	2008	334.870	27.87%
5.	2009	309.610	25.73%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Dari angka-angka tersebut, pada Tahun 2009 Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten peringkat 3

(tiga) terbesar di Jawa Tengah dalam hal persentase penduduk miskin. Hal ini tentu menjadi catatan dan perhatian yang penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kebumen.

Untuk mengetahui kesejahteraan penduduk di Kabupaten Kebumen dapat juga dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia yang sekaligus merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen pada Tahun 2006 sebesar 68,11 (enam puluh delapan koma sebelas) meningkat menjadi 69,87 (enam puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) pada Tahun 2008 dan 71,66 (tujuh puluh satu koma enam puluh enam) pada Tahun 2009. Secara rinci, capaian komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia tersebut adalah untuk Angka Harapan Hidup meningkat dari 68,93 (enam puluh delapan koma sembilan puluh tiga) pada Tahun 2006 menjadi 70,3 (tujuh puluh koma tiga) Tahun 2009, Angka Melek Huruf meningkat dari 89,3 (delapan puluh sembilan koma tiga) pada Tahun 2006 menjadi 89,98 (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) pada Tahun 2009, paritas daya beli meningkat dari

Rp 544.074,00 (lima ratus empat puluh puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) pada Tahun 2006 menjadi Rp 553.751 (lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) pada Tahun 2009, Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years School*) meningkat dari 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) tahun pada Tahun 2006 menjadi 6,85 (enam koma delapan puluh lima) tahun pada Tahun 2009, dan Pendapatan per Kapita meningkat dari Rp 1.640.737 (satu juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Tahun 2006 menjadi Rp 1.743.530 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) pada Tahun 2009. Dari data-data tersebut, di level Provinsi Jawa Tengah, peringkat Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2008 Kabupaten Kebumen berada pada posisi 25 (dua puluh lima) dan naik menjadi peringkat 24 (dua pulu empat) pada Tahun 2009.

3. Kesempatan Kerja

Secara umum kondisi dari upaya untuk peningkatan dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari perkembangan indikator ketenagakerjaan, terutama dari sisi

perkembangan angkatan kerja, penyerapan kerja seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.8. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2009

NO.	INDIKATOR	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Penduduk	1.222.343	1.231.872	1.241.544	1.247.811
2.	Angkatan Kerja	659.809	665.438	671.873	678.603
3.	Bekerja	623.465	628.801	634.882	641.242
4.	Mencari Kerja	36.344	36.637	36.991	37.361
5.	Lulusan Pelatihan Kerja	571	922	889	646
6.	Penempatan Tenaga Kerja	82	2.012	1.716	65.011
7.	Pencari Kerja	13.960	13.497	15.504	16.551
8.	Penempatan Tenaga Kerja AKAN	361	1.147	589	1.034

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen, Tahun 2010

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2009 telah terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja yang diciptakan dari penempatan tenaga kerja sebesar 65.011 (enam puluh lima ribu sebelas) orang yang tersebar pada beberapa lapangan usaha serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 1.034 (seribu tiga puluh empat) orang.

Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja di berbagai sektor pada tahun 2007 sebanyak 634.882 (enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh

dua) jiwa atau naik 2,64% (dua koma enam puluh empat) dari tahun 2004 yang sebesar 618.554 (enam ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh empat) jiwa. Jumlah tersebut terdistribusi pada berbagai sektor ekonomi dengan persentase yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Sektor terbanyak yang menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu sebesar 52,85% (lima puluh dua koma delapan puluh lima persen) dan sektor jasa-jasa sebesar 19,30% (sembilan belas koma tiga puluh persen).

C. Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Kondisi pendidikan secara umum dapat dilihat dari pencapaian akses, mutu relevansi, manajemen penyelenggaraan dan sarana prasarana pendidikan.

a. Pencapaian Akses Pendidikan

Pencapaian akses pendidikan dapat diketahui dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan. Untuk indikator-indikator tersebut,

selama Tahun 2007-2009, kondisi Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar
untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2009

JENJANG PENDIDIKAN	2005		2006		2007		2008		2009	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
SD	103,70	91,28	104,07	91,97	101,95	95,10	101,96	95,11	102,23	95,89
SMP	92,03	67,22	93,35	68,56	94,25	71,22	95,01	71,23	95,39	77,68
SLTA	40,46	31,08	56,04	40,21	57,54	40,40	56,52	40,41	57,75	42,17

Sumber : Kebumen Dalam Angka

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar dari Tahun 2005 sampai dengan 2009 cenderung konstan pada angka yang tinggi untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Mengah Pertama. Hal ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Namun demikian, untuk jenjang pendidikan menengah atas, tingkat partisipasinya masih di bawah 60% (enam puluh persen), yang menunjukkan masih

diperlukannya upaya lebih intensif untuk mendorong partisipasi sekolah di jenjang ini.

b. Mutu Relevansi Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat dilihat melalui indikator Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Kelayakan Mengajar (Angka Standar Pendidikan), Uji Kompetensi dan Sertifikasi Guru.

1) Angka Putus Sekolah

Pada Tahun 2005, Angka Putus Sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen) dan pada Tahun 2009 turun menjadi 0,03% (nol koma nol tiga persen), sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas menurun, dengan perincian untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2005 sebesar 0,62% (nol koma enam puluh dua persen) dan pada Tahun 2009 naik menjadi 0,92% (nol koma sembilan puluh dua persen), sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2005 sebesar 0,88% (nol koma delapan puluh delapan persen) dan pada Tahun 2009 turun

menjadi 0,92% (nol koma sembilan puluh dua persen). Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas karena Angka Putus Sekolah yang masih cukup tinggi.

Tabel 2.10. Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2009

TAHUN	ANGKA PUTUS SEKOLAH		
	SD	SMP	SMA
2005	5,07%	0,62%	0,88%
2006	0,10%	0,72%	0,87%
2007	0,45%	0,79%	0,70%
2008	0,08%	0,90%	0,93%
2009	0,03%	0,92%	0,92%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Tahun 2009

2) Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk seluruh jenjang pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mengalami kenaikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar pada Tahun 2005 sebesar 99,82% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) dan pada Tahun 2009 naik menjadi 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan

puluh delapan persen). Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2005 sebesar 80,51% (delapan puluh koma lima puluh satu persen) dan pada Tahun 2009 naik menjadi 84,98% (delapan puluh empat koma sembilan puluh delapan persen). Kemudian untuk jenjang Sekolah Menengah Atas mengalami kenaikan dari 80,77% (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh persen) pada Tahun 2005, menjadi 91,51% (sembilan puluh satu koma lima puluh satu persen) pada Tahun 2009.

Tabel 2.11. Angka Kelulusan Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2009

TAHUN	ANGKA KELULUSAN		
	SD	SMP	SMA
2005	99,82%	80,21%	80,77%
2006	99,92%	80,03%	81,65%
2007	99,99%	82,42%	89,85%
2008	99,21%	75,29%	89,50%
2009	99,88%	84,98%	93,84%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Tahun 2010

3) Angka Kelayakan Guru Mengajar

Angka Kelayakan Guru Mengajar (angka standar pendidikan) pada Tahun 2008 untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar 79,20%

(tujuh puluh sembilan koma dua puluh persen) dan pada Tahun 2009 naik menjadi 85,35% (delapan puluh lima koma tiga puluh lima persen). Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2008 sebesar 78,78% (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh delapan persen), pada Tahun 2009 naik menjadi 82,77% (delapan puluh dua koma tujuh puluh tujuh persen). Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2008 sebesar 74,10% (tujuh puluh empat koma sepuluh persen) dan pada Tahun 2009 naik menjadi 83,32% (delapan puluh tiga koma tiga puluh dua persen).

Tabel 2.12. Angka Kelayakan Guru Mengajar Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2009

TAHUN	ANGKA KELAYAKAN GURU MENGAJAR		
	SD	SMP	SMA
2006	73,77%	77,71%	66,70%
2007	71,55%	61,66%	74,63%
2008	79,20%	78,78%	74,10%
2009	85,35%	82,77%	83,32%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Tahun 2010

4) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Guru

Persentase guru lolos sertifikasi pada Tahun 2009 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen), untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar 5,9% (lima koma sembilan persen) dan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

c. Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan

Pencapaian indikator manajemen penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari persentase sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. Persentase sekolah yang menerapkan program Manajemen Berbasis Sekolah saat ini untuk Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 68% (enam puluh delapan persen).

Dilihat dari perbandingannya, rasio murid-guru di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 terus mengalami penurunan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada Tahun 2005, rasio guru-murid untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar 21,46, Sekolah Menengah Pertama sebesar 16,49 dan Sekolah Menengah Atas sebesar 16,50. Angka ini menurun pada Tahun 2009 menjadi 16,82 untuk jenjang Sekolah Dasar, 15,78 untuk Sekolah Menengah Pertama dan 12,25 untuk jenjang Sekolah Menengah Atas. Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.13. Rasio Murid-Guru
di Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2009

NO.	KOMPONEN	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Rasio Murid Guru SD	21,46	21,33	18,89	20,25	16,82
2	Rasio Murid Guru SMP	16,49	16,14	16,32	15,99	15,78
3	Rasio Murid Guru SMA	16,50	19,31	14,77	13,04	12,25

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Tahun 2010

Dari tabel di atas, kondisi rasio murid-guru di Kabupaten Kebumen sudah sangat baik. Namun demikian, dari angka rasio murid-guru yang semakin

baik tersebut, masih terdapat beberapa wilayah atau sekolah yang mengalami kekurangan guru, terutama di daerah-daerah pelosok. Hal ini tentunya membutuhkan perbaikan dalam hal manajemen pendistribusian guru yaitu penempatan-penempatan guru sesuai dengan kebutuhan di setiap sekolah dan wilayah.

d. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan telah dilakukan beberapa kegiatan meliputi rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah baru maupun ruang kelas baru. Saat ini tersedia 600 (enam ratus) unit *Play Group*/Taman Kanak-kanak, 955 (sembilan ratus lima puluh lima) unit Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah, 178 (seratus tujuh puluh delapan) unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dan 95 (sembilan puluh lima) unit Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Di samping itu, terdapat juga Perguruan Tinggi yaitu : Universitas Negeri Sebelas Maret Kampus Kebumen, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Putra Bangsa, Politeknik Dharma Patria, Sekolah Tinggi Teknik Muhammadiyah Gombong dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong.

Sementara itu, berdasarkan data profil pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2009/2010, jumlah ketersediaan sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah seperti tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14. Jumlah Sekolah, Siswa dan Rasio Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010

NO.	KOMPONEN	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK
1.	Sekolah	914	198	39	56
2.	Ruang Kelas	5.612	1.980	458	588
3.	Siswa	147.142	71.742	13.775	26.632
4.	Rasio	1 : 26	1 : 36	1 : 30	1 : 50

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Tahun 2009

Dengan mengambil jumlah ideal sesuai dengan standar nasional yaitu untuk sebuah kelas berisi 40 (empat puluh) siswa, maka rasio ideal jumlah kelas terhadap jumlah siswa adalah 1 : 40. Berdasarkan tabel tersebut di atas, didapatkan data bahwa rasio jumlah kelas terhadap siswa untuk

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah 1 : 26, untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah adalah 1 : 36, sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah adalah 1 : 30. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini jumlah kelas untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah meskipun di atas angka ideal tetapi masih dalam batas toleransi dan dapat dianggap cukup.

2. Kesehatan

Sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen juga menunjukkan peningkatan. Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain :

a. Angka Kematian Bayi

Jumlah bayi meninggal pada Tahun 2008 sebesar 5,1/1000 (lima koma satu per seribu) Kelahiran Hidup dan pada Tahun 2009 menurun

menjadi 5,02/1000 (lima koma nol dua per seribu) Kelahiran Hidup. Hal ini menunjukan adanya keberhasilan usaha untuk menekan risiko kematian bayi akibat persalinan, keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari dukungan banyaknya jumlah Posyandu yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Kebumen dengan jumlah total kurang lebih 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) unit.

b. Gizi Buruk

Kejadian gizi buruk mengalami penurunan, pada Tahun 2008 sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) orang atau 0,13% (nol koma tiga belas persen) dan pada Tahun 2009 turun menjadi 87 (delapan puluh tujuh) orang atau 0,09% (nol koma nol sembilan persen), angka tersebut masih perlu ditekan hingga mencapai 0 (nol) atau tidak ada kejadian gizi buruk.

c. Angka Kesakitan

Angka kesakitan dengan penyebab kesakitan melalui kasus penyakit Demam Berdarah *Dengue*, pada Tahun 2007 sebesar 22,80 (dua puluh dua koma

delapan) dan menurun pada Tahun 2009 menjadi 0,012 (nol koma nol dua belas).

d. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dalam upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat pada level kecamatan pada saat ini telah ada secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Untuk kategori Puskesmas Non Perawatan terdapat 5 (lima) kecamatan yang memiliki 2 (dua) Puskesmas dan 1 (satu) kecamatan memiliki 3 (tiga) Puskesmas. Sedangkan untuk Puskesmas Perawatan terdapat 5 (lima) unit yang terletak di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Ambal, Prembun, Kutowinangun, Gombong dan Karanganyar. Total jumlah Puskesmas pada Tahun 2009 sejumlah 35 (tiga puluh lima) unit untuk melayani seluruh penduduk Kebumen atau 1 (satu) Puskesmas rata-rata melayani 35.196 (tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam) penduduk. Berdasarkan rasio ini sebetulnya masih diperlukan penambahan Puskesmas, karena idealnya 1 (satu) Puskesmas melayani 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk. Oleh karena itu, untuk mencukupi

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka didirikan Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh Kabupaten Kebumen secara merata dan proporsional berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk. Jumlah Puskesmas Pembantu ini sebanyak 74 (tujuh puluh empat) unit pada Tahun 2009. Dengan jumlah tersebut, maka 1 (satu) Puskesmas Pembantu rata-rata melayani 6 (enam) desa/kelurahan.

Di sisi lain, Kabupaten Kebumen pada Tahun 2009 sudah memiliki Posyandu sejumlah 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) unit, Polindes sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) unit serta didukung operasional Puskesmas Keliling sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit. Dari angka tersebut, maka rata-rata dalam satu desa/kelurahan memiliki 5 (lima) buah Posyandu. Pelayanan Posyandu di Kabupaten Kebumen sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio pelayanan Posyandu terhadap jumlah balita yaitu 1 (satu) Posyandu rata-rata melayani 41 (empat puluh satu) balita, sedangkan idealnya 1 (satu) Posyandu melayani 50-100 balita. Untuk rasio dokter dan tenaga paramedis dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun

2009 sebesar 1 : 2.975. Rasio ini masih di atas Standar Pelayanan Minimal yang semestinya yaitu 1 : 1.538, sehingga untuk Kabupaten Kebumen masih perlu penambahan tenaga dokter dan paramedis.

D. Daya Saing

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen secara agregat dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Brutto per kapita. Data lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.15. Produk Domestik Regional Brutto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2009

NO.	TAHUN	PDRB PER KAPITA (RP)
1.	2006	3.352.404
2.	2007	3.723.285
3.	2008	4.289.413
4.	2009	4.701.978

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Kebumen, 2009

Dari tabel 2.15 dapat dilihat bahwa pada periode Tahun 2006-2009, Produk Domestik Regional Brutto per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dengan persentase 12,86% (dua

belas koma delapan puluh enam persen) rata-rata per tahun.

2. Sarana dan Prasarana

Aktivitas manusia dan pergerakan barang di Kabupaten Kebumen selama ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Diantaranya adalah keberadaan jalan/jembatan, sumber daya air, perhubungan, sarana pelayanan dasar dan lain-lain.

a. Kondisi Jalan dan Jembatan

Jalan memiliki fungsi yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Keberadaan jalan menjadi kebutuhan mutlak untuk memfasilitasi terjadinya mobilitas orang dan barang, serta pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang tersedia, dilihat dan kondisinya, dari total panjang jalan Kabupaten Kebumen sebesar 615,2 (enam ratus lima belas koma dua) kilometer, jalan dengan kondisi baik mencapai 375,2 (tiga ratus tujuh puluh lima koma dua) kilometer atau 60,99% (enam puluh koma sembilan puluh sembilan persen), kondisi sedang 132,4 (seratus tiga puluh dua koma empat) kilometer atau 21,52% (dua puluh satu koma lima

puluh dua persen), rusak ringan 56,1 (lima puluh enam koma satu) kilometer atau 9,12% (sembilan koma dua belas persen) dan rusak berat 51,5 (lima puluh satu koma lima) kilometer atau 8,37% (delapan koma tiga puluh tujuh persen). Selain itu, saat ini terdapat 442 (empat ratus empat puluh dua) buah jembatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan bentang jembatan sangat bervariasi antara 6 (enam) meter hingga 140 (seratus empat puluh) meter. Total panjang jembatan di Kabupaten Kebumen yaitu 4.939 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) meter.

Kabupaten Kebumen juga dilalui jalur Kereta Api Jawa Bagian Selatan, yang melintasi Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Prembun dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) kilo meter.

b. Sumber Daya Air

Untuk meningkatkan produktivitas hasil bumi terutama tanaman pangan khususnya di lahan persawahan yang secara produktif ditanami padi, palawija dan sayuran sangat membutuhkan aliran irigasi. Kabupaten Kebumen memiliki potensi 2 (dua) waduk yaitu Waduk Wadaslintang yang melayani 21.402 (dua puluh satu ribu empat ratus dua) hektar dan Waduk Sempor yang melayani 6.478 (enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektar. Selain itu di luar sistem waduk terdapat irigasi teknis seluas 622 (enam ratus dua puluh dua) hektar. Adapun jaringan irigasi yang diperlukan adalah jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, dengan bentuk bangunan permanen dan semi permanen.

Sampai saat ini telah dilakukan pembangunan dan renovasi bangunan air. Adapun bangunan air yang dapat direalisasikan adalah, melakukan rehabilitasi saluran induk : Sempor Timur, Sempor Barat, Bedegolan untuk menjamin kelancaran eksploitasi air irigasi sepanjang 3.801 (tiga ribu delapan ratus satu) kilometer. Perbaikan talud sungai

sepanjang 1.084 (seribu delapan puluh empat) meter. Di samping itu telah mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana irigasi berupa sebuah bendung, 15 (lima belas) buah bangunan air, dan 17 (tujuh belas) km saluran. Hal ini juga didukung oleh meningkatkan kemampuan masyarakat petani dalam wadah kelembagaan Perkumpulan Petani Pengguna Air Dharma Tirta.

Sumber daya air sungai perlu dikembangkan untuk memenuhi suplai air. Saat ini ada 4 (empat) Sub Satuan Wilayah Sungai, yaitu Sub Satuan Wilayah Sungai Telomoyo, Sub Satuan Wilayah Sungai Luk Ulo, Sub Satuan Wilayah Sungai Medono dan Sub Satuan Wilayah Sungai Ijo. Program yang dikembangkan adalah pengembangan teknologi pengelolaan Daerah Aliran Sungai prioritas secara terpadu, pengembangan sistem tataguna dan alokasi air bagi berbagai keperluan sektor pembangunan dalam satuan Daerah Aliran Sungai, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ekosistem Daerah Aliran Sungai dan peningkatan

pengolaan daerah resapan air serta pemasyarakatan pembuatan sumur resapan.

c. Perhubungan

Untuk transportasi di wilayah Kabupaten Kebumen saat ini tersedia 56 (lima puluh enam) rute angkutan umum atau meningkat dibanding kondisi pada Tahun 2006 sebanyak 50 (lima puluh) rute. Angkutan umum tersebut dilayani oleh bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Pedesaan. Disamping itu juga tersedia travel, bus sewa dan bus pariwisata. Untuk mobilitas atau transportasi barang menggunakan truk, trailer, pickup dan truk box.

Ketersediaan sarana angkutan umum sebagai bagian dan sarana pelayanan dasar ada di 26 (dua puluh enam) Kecamatan berupa angkutan pedesaan. Sarana pengangkutan lain yang menghubungkan antar kota dengan kapasitas tempat duduk antara 24 (dua puluh empat) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang terdapat di jalur trayek yang melalui wilayah pada 14 (empat belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan

Karanganyar, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun, Kecamatan Padureso, Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah. Bus dengan kapasitas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun, Kecamatan Padureso, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah. Angkutan Pedesaan tersebar pada 26 (dua puluh enam) kecamatan.

Untuk memfasilitasi kelancaran transportasi terdapat beberapa terminal yaitu 1 (satu) buah terminal tipe A di Kebumen, 1 (satu) buah terminal tipe B di Gombong, 3 (tiga) buah terminal tipe C

di Kebumen, Gombong dan Prembun serta 4 (empat) buah pendukung terminal, yaitu di Pasar Karanganyar, Pasar Petanahan, Pasar Kutowinangun dan Pasar Demangsari Ayah.

Sarana perhubungan lainnya berupa telekomunikasi yang difasilitasi dengan telepon kabel dan telepon tanpa kabel. Pemanfaatan sarana telepon telah tersebar luas ke seluruh wilayah. Berdasarkan data dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, pada Tahun 2009, penggunaan telepon di Kabupaten Kebumen oleh pelanggan khususnya terdapat di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kebumen, Gombong, Kutowinangun, Karanganyar, Prembun dan Petanahan. Adapun jumlah pelanggan telepon di 6 (enam) kecamatan tersebut mencapai 10.013 (sepuluh ribu tiga belas) sambungan telepon kabel dan 4.795 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) sambungan telepon tanpa kabel.

3. Perumahan dan Pemukiman

Kawasan pemukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang bagian kawasan perkotaan maupun perdesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Umumnya, untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan masyarakat di dalamnya, tersedia pula prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

Kabupaten Kebumen mempunyai luas kawasan permukiman sebesar 36.399 (tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar dengan status kepemilikan rumah milik sendiri sebanyak 308.000 (tiga ratus delapan ribu) unit. Sementara untuk penyediaan perumahan melalui KPR/BTN sejumlah 1.318 (seribu tiga ratus delapan belas) unit.

4. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan
   a. Peran strategis dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Kebumen masuk dalam kategori :
      1) Rencana Penetapan Kawasan Strategi Barlingmascakeb;
      2) Pembentukan Kawasan Regional Wonosobo-Banjarnegara-Kebumen yang berpusat di Wonosobo dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan lokal dan Provinsi;

3) Kawasan Strategis dari sisi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan ini memiliki otensi yang cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan, dan menjadi kawasan yang mampu mempercepat kawasan di sekitarnya yang masih tertinggal;
4) Kawasan Strategis Karangsambung, yaitu kawasan dengan sumber daya alam yang sangat strategis dan penting dari sudut Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi;
5) Kawasan Strategis untuk kepentingan Pertanahan dan Keamanan di Pantai Selatan Mirit;
6) Rencana Pengembangan jalan bebas hambatan sepanjang Ciamis-Cilacap-Yogyakarta;
7) Rencana Pengembangan jalan Kolektor primer Jalur Jalan Lintas Selatan;
8) Rencana Pengembangan jaringan rel jalur ganda antara Kutoarjo-Cilacap; dan
9) Rencana penggelaran serat optik yang menghubungkan kota-kota di jalur Pantura dan Pansela, salah satunya antara Cilacap-Sragen.

b. Peran Strategis di Kabupaten Kebumen masuk dalam kategori :

1) Sebagai salah satu lumbung padi Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi surplus dan pengembangan komoditas lain yang memfokuskan agribisnisnya;
2) Terletak di jalur strategis pada pengembangan jalan bebas hambatan sepanjang Cilacap-Yogyakarta dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS);
3) Pengembangan Perkotaaan pertumbuhan cepat di Kota Gombong, Karanganyar, Sruweng, Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Petanahan, Karangsambung;
4) Pengembangan Wilayah pesisir sepanjang pantai Selatan Mirit dan Ambal, Bulspesantren, Petanahan, Puring dan Ayah;
5) Memiliki kawasan lindung yaitu Kawasan Karst Gombong dan Cagar Alam Geologi Karangsambung:

a) Kawasan Karst Gombong dikembangkan di bidang ilmu pengetahuan dan industri pengolahan;
b) Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dikembangkan di bidang Ilmu pengetahuan Sumber Daya Alam dan Pendidikan sebagai kawasan lindung tingkat dunia.

6) Sebagai kawasan andalan untuk pertambangan serta industri pengolahan pada komoditas batu bata dan genteng di pejagoan dan sekitarnya;
7) Sebagai kawasan andalan di sepanjang Pantai Ayah dan sekitarnya dengan unggulan pada bidang pariwisata;
8) Sebagai Pengembangan kawasan andalan cagar alam di Karangsambung, dan cagar budaya bangunan bersejarah;
9) Bidang pengembangan Minopolitan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di Pantai Ayah dan sekitarnya;
10) Sebagai kawasan andalan pengembangan pergudangan, dagangan dan jasa di Petanahan;

11) Pengembangan kawasan Waduk Wadaslintang dan Waduk Sempor; dan
12) Sebagai pengembangan kawasan budidaya sarang.

5. Sarana dan Prasarana Energi Listrik

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kebumen yang mendapatkan listrik sebanyak 143.004 (seratus empat puluh tiga ribu empat) Kepala Keluarga dengan pemakaian listrik sebesar 127.666.086 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan puluh enam) Kilowatt Hour. Sedangkan panjang jaringan listrik perdesaan yang sudah tertangani sepanjang 269,50 (dua ratus enam puluh sembilan koma lima puluh) kilometer.

6. Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
   a. Penyediaan air bersih bagi masyarakat desa yang rawan air, di mana Kabupaten Kebumen masih terdapat 143 (seratus empat puluh tiga) desa yang rawan air, pada Tahun 2008 telah tercukupi 65 (enam puluh lima) desa dan Tahun 2009 meningkat menjadi 80 (delapan puluh) desa melalui program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Penyediaan Air Minum

dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dan Dana Alokasi Khusus Air Bersih.

b. Jumlah rumah tangga yang menggunakan air berkualitas sangat bersih sebanyak 17.316 (tujuh belas ribu tiga ratus enam belas) Kepala Keluarga atau sekitar 5,99% (lima koma sembilan sembilan persen). Rumah tangga yang mengkonsumsi air bersih sebanyak 194.740 (seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) Kepala Keluarga atau sekitar 67,42% (enam puluh tujuh koma empat dua persen), dan rumah tangga yang mengkonsumsi air kurang bersih sebanyak 76.796 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) Kepala Keluarga atau sekitar 26.59% (dua puluh enam koma lima sembilan persen).

c. Pada tahun 2008 cakupan kepemilikan jamban/akses masyarakat terhadap jamban keluarga, baru 67,89% (enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen). Tetapi, pada Tahun 2009 ada 17 (tujuh belas) desa di Kabupaten Kebumen yang sudah berstatus Desa *Open Defecation Free* (ODF) artinya tidak ada

satupun penduduk desa yang Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat.

E. Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen telah menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*). Di antaranya dengan transparansi informasi publik melalui berbagai media (cetak dan elektronik), dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Proses demokratisasi masyarakat berlangsung hingga pelosok desa.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerapkan Perizinan Satu Pintu (*One Stop Service*) dalam pelayanan perizinan. Dengan pelayanan tersebut, jumlah perizinan yang diterbitkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari angka 1.338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan) izin pada Tahun 2006 menjadi 4.017 (empat ribu tujuh belas) izin pada Tahun 2009.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa adalah dengan melakukan peningkatan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan pengelolaan sumber-sumber

pendapatan desa dan peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat desa.

Peningkatan terhadap kualitas pelayanan umum di Kabupaten Kebumen dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator kualitatif. Sampai dengan Tahun 2009 akses informasi publik terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Kebumen masih tetap dapat peroleh melalui beberapa media seperti Ratih TV, In FM, website resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen serta *direct mail* yang dikelola oleh Dinas Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi. Disamping itu dengan telah dibukanya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, lebih memudahkan masyarakat Kebumen dalam hal pengurusan perizinan. Penjualan aset-aset pemerintah berupa kendaraan yang telah habis umur ekonomisnya dengan sistem lelang terbuka menunjukkan salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Sedangkan dari aspek kepegawaian, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen per Januari 2009 sebanyak 14.321 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh satu) orang terdiri dari 7.937 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) orang pegawai laki-laki atau 55,42% (lima puluh lima

koma empat puluh dua persen) dan 5.906 (lima ribu sembilan ratus enam) pegawai perempuan atau 41,24% (empat puluh satu koma dua puluh empat) persen. Dari jumlah tersebut apabila dilihat dari kualifikasi pendidikan, terdiri dari: 567 (lima ratus enam puluh tujuh) orang atau 3,96% (tiga koma sembilan puluh enam persen) berpendidikan Sekolah Dasar; 874 (delapan ratus tujuh puluh empat) orang atau 6,10% (enam koma sepuluh persen) berpendidikan Sekolah Menengah Pertama; 5.941 (lima ribu sembilan ratus empat puluh satu) orang atau 41,48% (empat puluh satu koma empat puluh delapan persen) berpendidikan Sekolah Menengah Atas; 69 (enam puluh sembilan) orang atau 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen) berpendidikan Diploma I, 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) orang atau 20,11% (dua puluh koma sebelas persen) berpendidikan Diploma II; 746 (tujuh ratus empat puluh enam) orang atau 5,21% (lima koma dua puluh satu persen) berpendidikan Diploma III, 11 (sebelas) orang atau 0,08% (nol koma nol delapan persen) berpendidikan Diploma IV, 3.148 (tiga ribu seratus empat puluh delapan) orang atau 21,98% (dua puluh satu koma sembilan puluh delapan persen) berpendidikan Sarjana serta

85 (delapan puluh lima) orang atau 0,59% (nol koma lima puluh sembilan persen) berpendidikan Pasca Sarjana.

Prestasi yang ditorehkan Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2006-2010 di antaranya adalah pada Tahun 2009, Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Kedua dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan sebagai Nominator *Innovative Government Award* atau Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

F. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kebumen saat ini diarahkan pada efektivitas, efisiensi dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil dan pengelola keuangan daerah.

Dalam pelaksanaannya, proses penganggaran keuangan daerah mulai Tahun 2008 telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan dioperasikannya Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan aplikasi ini, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kebumen dapat berjalan lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pengelolaan secara manual. Namun demikian, di sisi yang lain, masih dirasakan adanya keterbatasan dalam penguasaan teknologi sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Dari sisi kelembagaan pengelolaan keuangan daerah, telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah khusus yang menangani pengelolaan keuangan daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2008. Dinas ini merupakan penggabungan antara Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Bagian Kekayaan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah, Kantor Kas Daerah serta Kantor Pendapatan Daerah.

Hasil dari optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dari Tahun 2003 sampai dengan saat ini, Kabupaten Kebumen selalu mendapat nilai atau kategori Wajar dengan Pengecualian. Nilai yang cukup bagus untuk kondisi pengelolaan keuangan daerah tingkat Kabupaten.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

F. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kondisi Pendapatan Saat Ini

a. Pendapatan Asli Daerah

Secara akumulatif, Pendapatan Asli Daerah kurun waktu 2006-2010 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18,42% (delapan belas koma empat puluh dua persen) per tahun yaitu dari Rp 48.183.351.393,00 (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) pada

Tahun 2006 menjadi Rp 60.151.533.000,00 (enam puluh milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada Tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 24,84%% (dua puluh empat koma delapan empat persen).

Meskipun setiap tahun mengalami peningkatan, satu catatan penting yang harus diperhatikan adalah kecenderungan semakin menurunnya persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan kecilnya kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Data yang ada menunjukkan bahwa dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah semula 68,17% (enam puluh delapan koma tujuh belas persen) pada Tahun 2006, turun menjadi 13,96% (tiga belas koma sembilan puluh enam persen) pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2010 persentase pertumbuhannya negatif yaitu -6,30% (minus enam koma tiga puluh lima persen). Dilihat dari kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selama kurun waktu 5 (lima)

tahun (2006-2010), nampak bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen merupakan bagian kecil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rata-rata kontribusi 6,15% (enam koma lima belas persen). Angka ini menunjukkan Kabupaten Kebumen masih belum mencapai kemandirian keuangan daerah. Untuk mencapai tingkat kemandirian atau otonomi yang nyata dan utuh, proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 15% (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).

Selengkapnya mengenai proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010 dapat dilihat dalam tabel 8.1 sebagai berikut :

Tabel 8.1. Pendapatan Asli Daerah dan Proporsinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010

TAHUN	PAD DALAM MILYAR (Rp)	PERTUM-BUHAN (%)	APBD DALAM MILYAR (Rp)	PROPORSI TERHADAP APBD (%)
2006	48,183	67.41	734,088	6.56
2007	54,909	13.96	956,432	5.74
2008	58,558	6.65	986,468	5.94
2009	64,195	9.63	992,090	6.47
2010	60,152	-6.30	999,054	6.02

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2010

Secara terperinci, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah dan Lain-lain pendapatan yang Sah. Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tahun 2006-2010 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan kurang lebih 24,83% (dua puluh empat koma delapan puluh tiga persen). Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2006-2010

TAHUN	P A D	PAJAK	RETRIBUSI	BUMD	LAIN-LAIN
2006	48.183.351.393	7.694.152.291	17.234.965.254	1.269.376.679	21.984.857.169
2007	54.908.872.931	8.740.397.128	19.719.486.628	1.327.583.327	25.121.405.848
2008	58.557.743.268	10.996.412.126	26.643.379.537	1.377.316.590	19.540.635.015
2009	64.194.504.063	10.964.523.583	32.024.576.227	1.682.292.416	19.523.111.837
2010	60.151.533.000	11.617.500.000	37.117.232.000	1.938.889.000	9.477.912.000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2010

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terbesar dari Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Sementara pendapatan dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah kontribusinya masih kecil. Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersifat insidentil sehingga tidak ada pola kenaikan yang tetap.

b. Dana Perimbangan

Proporsi jumlah dana perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen menunjukkan angka yang relatif besar dan dari tahun ke tahun masih menjadi penyumbang terbesar dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Proporsi dana perimbangan terhadap anggaran pendapatan dan balanja daerah dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 berkisar pada angka 74,44% (tujuh puluh empat koma empat puluh empat persen) sepeti diperlihatkan oleh tabel 8.2 sebagai berikut :

Tabel 8.3. Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010

TAHUN	DANA PERIM-BANGAN DALAM MILYAR (Rp)	PERTUM-BUHAN (%)	APBD DALAM MILYAR (Rp)	PROPORSI TERHADAP APBD (%)
2006	580,971	48,34	734,088	89,69
2007	658,395	13,33	956,432	68,84
2008	714,239	8,48	986,468	72,40
2009	748,025	4,73	992,090	75,39
2010	742,275	-0,77	999,054	74,29

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2010

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk menganggarkan penerimaan daerah yang

tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b. Jasa Giro;
c. Pendapatan Bunga;
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain dari akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h. Pendapatan denda pajak;
i. Pendapatan denda retribusi;
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k. Pendapatan dari pengembalian;
l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

2. Prediksi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Dalam era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, daerah membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap daerah dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah setiap daerah memiliki pendapatan daerah. Pendapatan daerah dibagi dalam beberapa jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah terbagi dalam 4 (empat) jenis penerimaan, yaitu Pajak Daerah, Retrbusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang

dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yng khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak kabupaten/kota dan tarif maksimumnya adalah pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Di samping pajak daerah, kabupaten/kota juga menerima (*share*) bagian pajak provinsi sebesar persentase tertentu yang terdiri atas : (1) pajak kendaraan bermotor, (2) bea balik nama kendaraan bermotor dan, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (3) pajak air permukaan, (4) pajak rokok.

Retribusi daerah dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Di samping itu, pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum : (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau

retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentraliasi, (3) jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelengaraannya, (6) retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik.

2) Retribusi Jasa Usaha : (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum

dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi Perijinan Tertentu : (1) perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, (2) perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

1) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan derah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
2) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
3) Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

Prediksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 8.3 berikut ini :

Tabel 8.4. Prediksi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

POS PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN (RP)				
	2011	2012	2013	2014	2015
PAJAK DAERAH	**13,722,500,000.00**	**13,656,032,140.00**	**13,886,671,162.00**	**26,623,641,239.60**	**27,371,342,067.08**
Pajak Hotel	*200,000,000.00*	*210,000,000.00*	*220,500,000.00*	*231,525,000.00*	*243,101,250.00*
Pajak Restoran	*300,000,000.00*	*330,000,000.00*	*363,000,000.00*	*399,300,000.00*	*439,230,000.00*
Pajak Hiburan	*47,500,000.00*	*48,000,000.00*	*48,500,000.00*	*49,000,000.00*	*49,500,000.00*
Pajak Reklame	*350,000,000.00*	*437,500,000.00*	*481,250,000.00*	*529,375,000.00*	*582,312,500.00*
Pajak Penerangan Jalan	*10,750,000,000.00*	*10,500,000,000.00*	*10,600,000,000.00*	*10,700,000,000.00*	*10,800,000,000.00*
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	*1,400,000,000.00*	*1,400,000,000.00*	*1,400,000,000.00*	*1,400,000,000.00*	*1,400,000,000.00*
Pajak Parkir	*35,000,000.00*	*58,132,140.00*	*66,977,162.00*	*72,225,599.60*	*77,395,488.68*
Pajak Air Tanah	*40,000,000.00*	*42,400,000.00*	*44,944,000.00*	*47,640,640.00*	*50,499,078.40*
Pajak Bea Perolehan Gak atas Tanah dan Bangunan	*600,000,000.00*	*630,000,000.00*	*661,500,000.00*	*694,575,000.00*	*729,303,750.00*
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*12,500,000,000.00*	*13,000,000,000.00*
RETRIBUSI DAERAH	**15,935,425,000.00**	**16,172,303,289.50**	**17,303,224,337.10**	**18,326,394,020.83**	**19,506,342,934.38**
RETRIBUSI JASA UMUM					
Retribusi Pelayananan	*3,721,350,000.00*	*3,721,350,000.00*	*3,721,350,000.00*	*3,721,350,000.00*	*3,721,350,000.00*

Kesehatan					
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	*387,000,000.00*	*481,420,989.40*	*523,679,802.32*	*524,572,795.76*	*595,882,335.64*
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil	*1,233,350,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
POS PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN (RP)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	*7,000,000.00*	*7,763,814.50*	*7,260,306.10*	*7,534,058.13*	*7,710,162.45*
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	*585,000,000.00*	*651,352,290.00*	*783,023,957.00*	*886,087,970.60*	*958,152,812.98*
Retribusi Pelayanan Pasar	*2,250,000,000.00*	*2,380,323,126.90*	*2,534,252,542.52*	*2,686,279,817.47*	*2,847,214,750.61*
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	*350,000,000.00*	*367,161,502.00*	*381,356,059.60*	*395,273,798.68*	*408,529,369.14*
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga	*685,000,000.00*	*40,000,000.00*	*50,000,000.00*	*50,000,000.00*	*50,000,000.00*
Retribusi Administrasi Perpindahan Penduduk	*50.000.000,00*	*50.000.000,00*	*50.000.000,00*	*50.000.000,00*	*50.000.000,00*
RETRIBUSI JASA USAHA					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	*880,600,000.00*	*942,242,000.00*	*1,008,198,940.00*	*1,078,772,865.80*	*1,154,286,966.41*
Retribusi Tempat Pelelangan	*499,500,000.00*	*549,450,000.00*	*604,395,000.00*	*664,834,500.00*	*731,317,950.00*
Retribusi Terminal	*245,000,000.00*	*257,655,583.00*	*260,081,736.40*	*281,200,580.62*	*284,032,449.30*
Retribusi Rumah Potong Hewan	*73,500,000.00*	*73,500,000.00*	*73,500,000.00*	*73,500,000.00*	*73,500,000.00*
Retribusi Tempat Rekreasi dan	*3,425,000,000.00*	*5,137,500,000.00*	*5,651,250,000.00*	*6,216,375,000.00*	*6,838,012,500.00*

Olah Raga					
Retribusi Inseminasi Buatan	*450,000,000.00*	*495,000,000.00*	*544,500,000.00*	*598,950,000.00*	*658,845,000.00*
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU					
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	*715,000,000.00*	*626,133,233.70*	*718,448,148.16*	*677,784,517.78*	*695,178,335.04*
Retribusi Ijin Gangguan	*242,000,000.00*	*243,399,450.00*	*230,470,065.00*	*238,031,077.00*	*242,139,784.10*
Retribusi Ijin Trayek	*49,500,000.00*	*52,763,800.00*	*56,641,530.00*	*60,549,164.00*	*63,362,856.20*
POS PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN (RP)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Retribusi Ijin Perdagangan (SIUP, TDG, TDI, TDP)	*86.625.000,00*	*95,287,500.00*	*104,816,250.00*	*115,297,875.00*	*126,827,662.50*
HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**3,366,159,500.00**	**3,877,019,000.00**	**4,683,993,000.00**	**5,354,872,000.00**	**6,223,939,200.00**
Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	**648,914,000.00**	**713,805,000.00**	**791,355,000.00**	**870,060,000.00**	**946,546,000.00**
Perusda PDAM *)	*605,000,000.00*	*665,500,000.00*	*732,050,000.00*	*805,255,000.00*	*868,780,000.00*
Perusda Apotik Luk Ulo	*43,914,000.00*	*48,305,000.00*	*59,305,000.00*	*64,805,000.00*	*77,766,000.00*
Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	**2,717,245,500.00**	**3,163,214,000.00**	**3,892,638,000.00**	**4,484,812,000.00**	**5,277,393,200.00**
BPD Jateng	*1,500,000,000.00*	*1,650,000,000.00*	*1,980,000,000.00*	*2,376,000,000.00*	*2,851,200,000.00*
PD. Bank Kebumen (dulu Bank Pasar)	*371,910,000.00*	*553,112,000.00*	*889,422,000.00*	*943,388,000.00*	*1,037,726,800.00*

PD BPR BKK	*845,335,500.00*	*960,102,000.00*	*1,023,216,000.00*	*1,165,424,000.00*	*1,388,466,400.00*
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	**29,874,035,000.00**	**29,868,518,500.00**	**30,043,702,300.00**	**30,141,101,690.00**	**30,248,445,862.00**
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	*1,669,900,000.00*	*1,586,405,000.00*	*1,669,900,000.00*	*1,669,900,000.00*	*1,669,900,000.00*
Penerimaan Jasa Giro	*650,000,000.00*	*650,000,000.00*	*650,000,000.00*	*650,000,000.00*	*650,000,000.00*
Pendapatan Bunga Deposito	*2,250,000,000.00*	*2,250,000,000.00*	*2,250,000,000.00*	*2,250,000,000.00*	*2,250,000,000.00*
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	*25,000,000.00*	*27,478,000.00*	*35,243,400.00*	*40,977,720.00*	*49,399,476.00*
POS PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN (RP)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	*7,935,000.00*	*10,315,500.00*	*13,806,900.00*	*16,996,770.00*	*18,596,466.00*
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	*731,200,000.00*	*804,320,000.00*	*884,752,000.00*	*973,227,200.00*	*1,070,549,920.00*
Penerimaan Lainnya	*24,540,000,000.00*	*24,540,000,000.00*	*24,540,000,000.00*	*24,540,000,000.00*	*24,540,000,000.00*
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	**62,898,119,500.00**	**63,573,872,924.50**	**65,917,590,775.10**	**80,446,008,928.73**	**83,350,070,033.10**

Dari tabel 8.4 dapat dilihat persentase prediksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 8.5. Prediksi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PERTUMBUHAN (%)
2011	62,898,119,500.00	4.57
2012	63,573,872,924.50	1.07
2013	65,917,590,775.10	3.69
2014	80,446,008,928.73	22.04
2015	83,350,070,033.10	3.61

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kebumen

Mengacu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang tentang Kependudukan, ada beberapa retribusi yang sampai dengan 2010 masih menjadi andalan harus dibebaskan atau ditiadakan sampai dengan Tahun 2015. Beberapa pos pendapatan yang mengalami perubahan, di antaranya:

1) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dihapus mulai Tahun 2012;
2) Retribusi kesehatan dari RSUD beralih menjadi penerimaan lain di pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal ini disebabkan diberlakukannya Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kabupaten Kebumen;
3) Pajak Bumi dan Bangunan masuk menjadi Pajak Daerah mulai Tahun 2014, di mana sebelumnya menjadi bagian dari Pos Dana Perimbangan dalam pendapatan daerah.

3. Arah pengelolaan pendapatan daerah

Kebijakan anggaran pendapatan melalui konsep peningkatan pendapatan daerah secara proporsional, sebagai berikut :

a. Menyiapkan kerangka kebijakan serta piranti pengembangan kekuatan dan peluang daerah dalam sisi pendapatan jangka menengah dan jangka penjang;
b. Sosialiasi secara berkelanjutan pada masayarakat tentang pentingnya partisipasi mereka bagi kelanjutan pembangunan daerah;
c. Peningkatan kapabilitas serta kinerja aparatur pemungut; dan
d. Pengawasan secara lebih optimal terhadap sistem pendapatan.

Dalam masa pelaksanaan desentralisasi fiskal, pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah dan pembiayaan.

Sebagaimana permasalahan yang secara klasik dihadapi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, maka unsur keterbatasan area potensi pungut di daerah,

kesadaran masyarakat dan mentalitas petugas pemungut menjadi faktor utama yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Meskipun dalam perkembangannya senantiasa mengalami fluktuasi, akan tetapi apabila dibandingkan antara kenaikan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, maka tentu masih jauh dari memadai.

G. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen saat ini

Struktur belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2010 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan

program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Proporsi belanja Kabupaten Kebumen Pada periode Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.6. Proporsi Belanja

Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2010

TA-HUN	APBD DALAM MILYAR (Rp)	BTL DALAM MILYAR (Rp)	PROPORSI BELANJA TIDAK LANGSUNG (%)	BELANJA LANGSUNG DALAM MILYAR (Rp)	PROPORSI BELANJA LANGSUNG (%)
2007	956,432	570,009	59,60	386,423	40,40
2008	986,468	606,744	61,51	379,724	38,49
2009	992,090	675,337	68,07	316,753	31,93
2010	999,054	802,698	80.35	196,356	19,65

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kebumen

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Tidak Langsung setiap tahun selalu lebih besar daripada Belanja Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2007-2010 rata-rata mencapai angka 67,38% (enam puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen), sedangkan proporsi Belanja Langsung terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2007-2010 rata-rata mencapai angka 32,62% (tiga puluh dua koma enam puluh dua persen).

2. Prediksi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Kebutuhan anggaran untuk belanja pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 di samping mendapatkan dukungan dari dana bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang paling utama tentu bersumber dari anggaran pemerintah daerah sendiri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan yang sah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan dari Provinsi.

Kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan terus meningkat sebab meningkatnya kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen semakin meningkat kemandiriannya dalam pembiayaan pembangunan daerah.

3. Arah Pengelolaan Belanja

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada prinsip

money follow function. Di samping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah melalui pendekatan kinerja.

H. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
6. Penerimaan piutang daerah;
7. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; dan
8. Penerimaan kembali dana talangan.

Pengeluaran pembiayaan mencakup :

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang;
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pembayaran utang belanja;
6. Pemberian dana talangan; dan
7. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

I. Kebijakan Umum Anggaran

Dari sudut pandang pengeluaran, anggaran belanja yang dialokasikan untuk pembangunan daerah harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas; anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang

diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, anggota masyarakat berhak mengetahui proses anggaran dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut;

2. Disiplin anggaran; kegiatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya;
3. Keadilan anggaran; pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan;

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran. Setiap kegiatan yang direncanakan harus efektif dalam pencapaian kinerjanya dan efisien dalam pengalokasian dananya; dan
5. Disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran disusun dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sebanding atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

Dari sisi pendapatan, pada masa desentralisasi fiskal saat ini, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai ujung tombak penghasil pendapatan daerah, mutlak harus dilaksanakan. Badan Usaha Milik Daerah terutama yang bergerak dalam transaksi keuangan seperti Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen dapat didayagunakan untuk meningkatkan kinerja perekonomian regional Kabupaten Kebumen. Melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi, kedua Badan Usaha Milik Daerah tersebut dapat lebih progresif menyalurkan

pembiayaannya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat dilakukan secara optimal apabila lembaga tersebut mampu menyerap dana dari masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada para nasabah dan pada saat yang bersamaan memperkuat permodalannya sehingga bank menjadi lebih sehat dan lebih mampu meningkatkan pembiayaannya untuk pengembangan usaha masyarakat.

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab sebelumnya telah diuraikan gambaran umum Kabupaten Kebumen sebagai hasil pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun periode yang lalu. Dari kondisi yang telah dicapai tersebut, dapat ditelaah beberapa isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan di Kabupaten Kebumen. Isu strategis adalah keterkaitan antara Kabupaten Kebumen dengan lingkungan internal maupun eksternalnya.

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan/Potensi

a. Pelaksanaan otonomi daerah membuka peluang untuk menggali potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang cukup besar, dengan sikap yang terbuka, kritis, dinamis dan adaptif merupakan potensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
c. Potensi pertanian dan unggulan pariwisata yang terdapat di seluruh wilayah mulai dari pesisir selatan, daerah tengah dan daerah atas/pegunungan, dengan jenis yang beragam dari wisata alam, wisata budaya sampai dengan wisata pendidikan, merupakan potensi yang sangat besar jika bisa dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah;
d. Tersedianya sumber daya alam, baik pertanian, kelautan dan perikanan;
e. Ketersediaan lahan yang masih luas untuk dikembangkan;
f. Masih kentalnya budaya gotong royong, kearifan lokal yang agamis, serta solidaritas masyarakat,

menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi berbagai problem pembangunan daerah;

g. Kemudahan akses media komunikasi dan informasi;

2. Kelemahan

a. Rendahnya kualitas penduduk dan tenaga kerja;

b. Keterbatasan sarana dan prasarana/infrastruktur;

c. Masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan;

d. Terbatasnya lapangan pekerjaan;

e. Masih belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investasi swasta dan masyarakat untuk akselerasi pembangunan daerah;

f. Lemahnya/belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan;

g. Masih rendahnya penguasaan teknologi termasuk teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;

h. Belum efisiennya pengelolaan sumber daya pendidikan dan kesehatan;

i. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

j. Masih lemahnya pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan;

k. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
l. Masih kurangnya apresiasi terhadap seni budaya lokal; dan
m. Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi pasar.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang
   a. Banyak alternatif untuk upaya pengembangan wilayah;
   b. Permintaan pasar akan hasil agribisnis dan agroindustri;
   c. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
   d. Semakin kuatnya peranan organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan serta lembaga-lembaga non pemerintah yang dapat dijadikan *partnership* dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

e. Terbukanya jejaring kerjasama antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kabupaten lain serta kerjasama dengan unsur swasta nasional dan daerah, yang dapat didayagunakan untuk mengembangkan perekonomian daerah;

2. Ancaman
   a. Masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada kondisi tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
   b. Belum terkendalinya migrasi penduduk;
   c. Belum terkendalinya alih fungsi lahan pertanian;
   d. Ketetapan hukum yang didasarkan pada aturan yang *out of date* (kadaluwarsa);
   e. Kebijakan di tingkat pusat yang cukup dinamis;
   f. Dampak ekonomi dan sosial globalisasi berpotensi mempengaruhi karakter dan kearifan budaya lokal; dan
   g. Persaingan pelayanan masyarakat antar daerah.

C. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 adalah keterkaitan antara Kabupaten Kebumen yang dikaji dengan kondisi lingkungan internal dan eksternalnya. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 antara lain sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik belum sepenuhnya terwujud

   Telah kita sadari bahwa kebijakan yang kondusif merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Namun, fakta yang ada menunjukkan masih adanya kelemahan dalam isu ini, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kebumen antara lain :

   a. Masih adanya kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan tuntutan kinerja yang optimal;
   b. Sumber daya manusia aparatur yang profesional, netral dan sejahtera belum sepenuhnya terwujud;

c. Masih terdapat kelemahan dalam pendataan penduduk secara akurat dan valid;

d. Penerapan jaringan *on-line* sistem informasi administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya terwujud;

e. Masih adanya peraturan perundang-undangan yang bermasalah dan diindikasikan inkonsisten, multitafsir, sulit diterapkan, menimbulkan biaya tinggi dalam penerapan yang pada akhirnya menciptakan hambatan dalam pembangunan (*bottleneck*).

2. Masih Rendahnya Tingkat Perekonomian Daerah

Isu-isu utama dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain:

a. Masih rendahnya tingkat pendapatan asli daerah

Fakta menyedihkan yang terjadi pada saat ini adalah kondisi keuangan pemerintah daerah, dimana komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kebumen setiap tahun didominasi sumber-sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat. Sementara pendapatan asli daerah cenderung stagnan, berjalan di tempat, tanpa ada pertumbuhan

yang berarti dari sisi jumlah penerimaan, sehingga kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah semakin menurun. Diperlukan upaya-upaya strategis untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada agar Kabupaten Kebumen bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada ujungnya bisa memperbaiki kemampuan keuangan daerah.

b. Pengembangan agrobisnis yang kurang optimal

Upaya pengembangan sektor agrobisnis dapat menolong mengembangkan dan mempromosikan agroindustri di wilayah tertinggal. Program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembang untuk mau meminjamkan lahan yang tidak dibangun atau lahan tidur untuk digunakan sebagai lahan pertanian perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yang tidak produktif ini dapat diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi penganggur di perdesaan. Program kerjasama mengatasi keterbatasan modal, mengurangi resiko produksi, memungkinkan petani memakai bahan baku impor dan produk yang dihasilkan dapat mampu

bersaing dengan barang impor yang sejenis serta mencarikan dan membuka pasaran yang baru.

Isu lain terkait pengembangan sektor agrobisnis adalah globalisasi yang menjadi faktor luar yang dapat menyebabkan merosotnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Sebagai contoh, karena kebijakan *Cina Asean Free Trade Area*, maka di pasaran dapat terjadi kelebihan stok produk pertanian akibat impor dalam jumlah besar dari luar yang bisa merusak sistem dan harga pasar lokal. Untuk tetap dapat bersaing, target pemasaran yang baru harus segera ditentukan untuk menyalurkan kelebihan hasil produksi pertanian dari petani lokal. Salah satu strategi yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya agar petani setempat dapat mengikuti dan melaksanakan proses produksi sampai ke tingkat penyaluran. Namun dari pada bersaing dengan produk impor yang masuk dengan harga murah, akan lebih baik jika petani setempat mengolah komoditi yang spesifik wilayah tersebut dan menjadikannya produk yang bernilai jual tinggi untuk kemudian

disebarluaskan di pasaran setempat maupun untuk diekspor.

c. Pengembangan sektor pariwisata yang mengalami kemandegan

Pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kabupaten Kebumen dengan potensi kawasan pantai yang panjang, apabila ditata dengan bersih dapat menjadi daya tarik wilayah, dan kemudian berlanjut dengan menarik turis dan penduduk ke wilayah tersebut. Sebagai salah satu lokasi rekreasi, kawasan pantai dapat merupakan tempat yang lebih komersial dibandingkan kawasan lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yang terbatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah wilayah pantai haruslah menjadi aset ekonomi untuk suatu wilayah.

Wisata budaya merupakan segmen yang berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona dari desa kecil adalah faktor utama dalam menarik wisatawan. Namun kegiatan pariwisata

bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan bersifat musiman juga, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menyebabkan ekonomi lokal dapat rentan terhadap perputaran siklus ekonomi.

Dengan potensi dan jenis wisata yang tersebar dan beraneka ragam, Kabupaten Kebumen semestinya bisa mengandalkan dan bisa mengoptimalkannya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Namun, harapan untuk menikmati hasil yang lebih baik dari potensi sektor pariwisata belum bisa terwujud.

3. Masih rendahnya kualitas sarana prasarana infrastruktur wilayah

Persepsi atas suatu wilayah, apakah memiliki kualitas hidup yang baik, merupakan hal penting bagi dunia usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Jika masyarakat ingin menarik modal dan investasi, maka haruslah siap untuk memberi perhatian terhadap keanekaragaman, identitas dan sikap bersahabat.

Pengenalan terhadap fasilitas untuk mendorong kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dan dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan.

Fasilitas dan sarana umum merupakan penarik kegiatan bisnis yang penting. Untuk melihat dan mengukur tingkat kenyamanan hidup pada suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan sarana umum di wilayah tersebut. Sarana umum merupakan kerangka utama dari pembangunan ekonomi dan sarana umum ini sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Sarana umum yang paling dasar adalah jalan, pembangkit listrik, sistim pengairan, sarana air bersih, penampungan dan pengolahan sampah dan limbah, sarana pendidikan seperti sekolah, taman bermain, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan masih banyak fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat.

Kepadatan, pemanfaatan lahan dan jarak merupakan tiga faktor utama dalam pengembangan sarana umum yang efektif. Semakin padat dan rapat penduduk, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana umum jauh lebih murah jika dilihat daya tampung per unitnya.

Pola pembangunan yang padat, kompak dan teratur, berbiaya lebih murah dari pada pembangunan yang linier atau terpencar-pencar. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana umum maka akan semakin memperkokoh dan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah tersebut.

Sarana umum yang baru perlu dibangun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Idealnya fasilitas sarana umum yang ada harus dapat menampung sesuai dengan kapasitas maksimalnya, sehingga dapat memberikan waktu untuk dapat membangun sarana umum yang baru. Penggunaan lahan dan sarana umum haruslah saling berkaitan satu sama lainnya. Perencana pembangunan seharusnya dapat memprediksikan arah pembangunan yang akan berlangsung sehingga dapat dibuat sarana umum yang baru untuk menunjang kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut. Penyediaan sarana dapat juga dilakukan dengan memberikan potongan pajak dan ongkos kompensasi berupa pengelolaan sarana umum kepada sektor swasta yang bersedia membangun fasilitas umum.

4. Belum mantapnya kondisi sosial dan budaya

Belum optimalnya usaha pemenuhan hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan termarjinalkan, antara lain dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan dasar belum menjangkau seluruh lapisan masyakarat

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah belum menjangkau seluruh masyakarat miskin yang ada di Kabupaten Kebumen. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin semakin terbatas.

b. Belum meratanya pendidikan yang bermutu terutama bagi masyarakat miskin

"Komersialisasi pendidikan" merupakan isu yang berkembang saat ini. Di tengah kebijakan pemerintah yang mewajibkan 20% (dua puluh persen) dari total anggaran belanja untuk bidang pendidikan, seharusnya pendidikan yang bermutu bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi fakta yang ada menunjukkan bahwa saat ini pendidikan yang bermutu hanya bisa dinikmati oleh

masyarakat mampu, sedangkan masyarakat miskin (walaupun berprestasi) hanya bisa mendapatkan pendidikan dengan mutu yang ‘seadanya”.

c. Masih tingginya angka kemiskinan

Upaya menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen hanya turun sebesar 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari angka 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen) menjadi 29,63% (dua puluh sembilan koma enam puluh tiga persen). Target angka kemiskinan menjadi 15,45% (lima belas koma empat puluh lima persen) atau turun sebesar 14,18% (empat belas koma delapan belas persen) pada Tahun 2015, menjadi sebuah pekerjaan yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

5. Koordinasi penanggulangan dan mitigasi bencana alam yang belum optimal

Dalam peta kerawanan bencana Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kawasan yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap kejadian bencana alam baik kekeringan, banjir,

tanah longsor, gempa bumi serta tsunami. Kabupaten Kebumen Perlu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian bencana alam ini. Dan tentunya juga perlu disusun Rencana Rencana Aksi Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana dengan harapan resiko dan dampak akibat bencana alam yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.

BAB V
SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Skenario pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen didasarkan pada asumsi masa kerja sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, perikanan,dan pariwisata yang diperkirakan akan mengalami fluktuasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang. Beberapa pemikiran pengembangan Kabupaten Kebumen paska fluktuatif antara lain pengembangan agrobisnis dan agroindustri di bidang kegiatan pertanian pada umumnya di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah,

memerlukan peningkatan pelayanan jasa dan potensi jaringan kerja lintas wilayah yang selama ini belum secara optimal dimanfaatkan.

Periode pertama merupakan periode inisiasi dimana komitmen pembangunan Kabupaten Kebumen telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010 yang lalu. Sebagai langkah awal dalam periode pembekalan dasar dari Tahun 2011-2020 adalah penyiapan sumber daya manusia dengan dukungan infrastruktur, menyertai upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Kebumen. Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan sebagai kerangka dasar Kabupaten Kebumen dalam memiliki pelaku-pelaku pembangunan andal yang cerdas dan sehat, yang ditujukan bagi generasi muda saat ini dan generasi mendatang. Di samping itu, juga harus didorong adanya pengembangan ekonomi wilayah agar masyarakat dan wilayah berproduksi dengan bertumpu pada pengembangan desa.

Periode selanjutnya adalah periode pematangan, yaitu pada kurun waktu Tahun 2021-2025. Pada periode ini diharapkan sumber daya manusia yang telah dibina dapat mengembangkan kegiatan ekonomi,yang mana produksi dalam skala keluarga dapat menjadi produksi wilayah kemudian menuju produksi menyeluruh.

Tahap berikutnya lagi dari paska skenario jangka panjang adalah periode pemantapan (Tahun 2026 dan selanjutnya) di mana masyarakat dan wilayah Kabupaten Kebumen telah menjadi tegar dan maju dalam arti siap dalam melakukan pembaharuan menangkap visi pengembangan wilayah pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan pariwisata yang andal untuk berupaya lebih maju lagi dengan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara.

A. Dasar Pemikiran Teknis-Substantif

Dasar pemikiran secara Teknis-Substantif skenario jangka panjang sebagai berikut:

1. Tumpuan pada konteks ‘pengembangan manusia’ dari yang ’belum bisa’ sampai dengan ‘berproduksi untuk keluarga’ ke arah ‘berproduksi untuk wilayah.
2. Bahwa seseorang (manusia) yang belum mengerti sesuatu perlu mendapat ‘penalaran’ dan ’keterampilan’ untuk bisa memahami dan mengerjakan sesuatu tersebut sehingga menjadi cerdas dan sehat. Diharapkan orang tersebut akan memanfaatkan ‘kemampuan mengerjakan sesuatu’ kemudian dapat ‘bekerja demi kehidupannya dan keluarga’.

Melalui upaya bekerja, orang memperoleh ‘pendapatan’ untuk kehidupan dan penghidupannya, dan dengan demikian bisa melakukan kegiatan ‘ekonomi keluarga’. Apabila sejumlah besar penduduk suatu wilayah dapat melakukan kegiatan ekonomi maka akan terbentuk kegiatan ekonomi wilayah. Artinya, wilayah ini akan bergiat dalam berproduksi secara nyata, kemudian berinteraksi antar wilayah dalam mencukupi kebutuhan wilayah, dan menciptakan kehidupan ekonomi wilayah yang lebih luas (regional). Dalam kondisi interaktif antar wilayah, suatu wilayah (r*egion*) akan tangguh berproses dalam kehidupan dan penghidupannya. Lama-kelamaan proses kehidupan dan penghidupan berlangsung secara stabil dan tangguh (mampu menghadapi berbagai kemungkinan) sehingga wilayah ini akan menjadi maju dan terus berkembang secara kuantitas dan kualitas, menjadi mandiri dan berkelanjutan.

3. Keseluruhan konteks proses kehidupan dan penghidupan *region* ini akan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Secara logika, perjalanan panjang (perkembangan) ini dapat digambarkan dalam tahap-tahap proses perkembangan. Seperti halnya manusia memiliki

tahap proses perkembangan anak-dewasa-tua-lanjut usia,wilayah juga mengenal tahap proses perkembangan: awal-muda-kembang matang dan lanjut.

B. Penafsiran Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen

1. Sebagai *Focal Concern* Pasca Fluktuasi (krisis), apabila kondisi ekonomi menurun dan tumpuan ekonomi Kabupaten Kebumen menghilang (skenario dramatika), maka pemerintah Kabupaten Kebumen dan masyarakatnya harus berbuat sesuatu saat lepas dari krisis ekonomi (sebagai respons kritikal). Sebagai tumpuan harapan, sesuai dengan potensi dasar kewilayahannya adalah: mengembangkan kegiatan agrobisnis dan agroindustri menengah dan kecil, mengembangkan kegiatan jasa pelayanan perkebunan (yang harus dipacu dengan menarik kepedulian industri perdagangan besar di Provinsi Jawa Tengah untuk turut mengembangkan agroindustri menengah dan kecil sejak dini). Hal ini dipandang sebagai visi jangka panjang.

2. Situasi kondisi masyarakat wilayah Kabupaten Kebumen yang telah beranjak dari statusnya sebagai wilayah kabupaten yang terbelakang menjadi kabupaten yang bersifat berkembang otonom, dipandang sebagai keadaan awal dengan memiliki modal dasar berupa pernyataan pengembangan setelah reformasi pemerintahan Tahun 2000 yang lalu, yakni upaya inisiasi membangun generasi muda melalui kegiatan pembangunan. Upaya tersebut telah dilakukan selama ini oleh wilayah-wilayah kecamatan sebagai bagian dalam wilayah kabupaten terbelakang. Secara normatif, harapan dari sifat posisi refatif wilayah Kabupaten Kebumen yang berada pada simpul jasa regional Jawa Tengah bagian selatan-tengah adalah supaya dapat memetik pembelajaran dan manfaat dari letaknya yang berbatasan dengan wilayah-wilayah kabupaten yang telah lebih dulu maju.
3. Upaya memprediksi masa depan wilayah Kabupaten Kebumen dapat dilakukan dengan mengaplikasikan alur pikir' proses pembelajaran anak manusia', yang pada dasarnya merupakan proses pengembangan penalaran dan ketrampilan melalui lorong-lorong pilihan jalan hidup

untuk pematangan dan pendewasaannya, menjadi sosok yang cerdas dan sehat. Masa sepuluh tahun (Tahun 2011-2020) merupakan proses pembelajaran setingkat Sekolah Dasar-Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yaitu pembekalan dasar untuk memilih jurusan atau minat dalam hidupnya. Asumsi masa inisiasi lima tahun pertama perlu ditambah dengan menyertakan upaya penyiapan sumber daya manusia sebagai dasar pembangunan generasi muda. Upaya penyiapan sumber daya manusia ini perlu didukung oleh pemilikan infrastruktur yang merupakan suatu prasyarat pembangunan wilayah.

4. Sebagai kelanjutan mengembangkan generasi muda menjadi generasi dewasa, masa 10 (sepuluh) tahun berikutnya dianalogikan sebagai masa belajar tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pendidikan Tinggi. Tahapan ini merupakan upaya pendewasaan diri. Dengan masyarakat yang sudah dipersiapkan sumber daya manusia dan infrastrukturnya selama Tahun 2010-2015, pada periode Tahun 2016-2020, diharapkan masyarakat Kabupaten Kebumen telah bermetamorfosis menjadi masyarakat yang cerdas, bisa bekerja dan

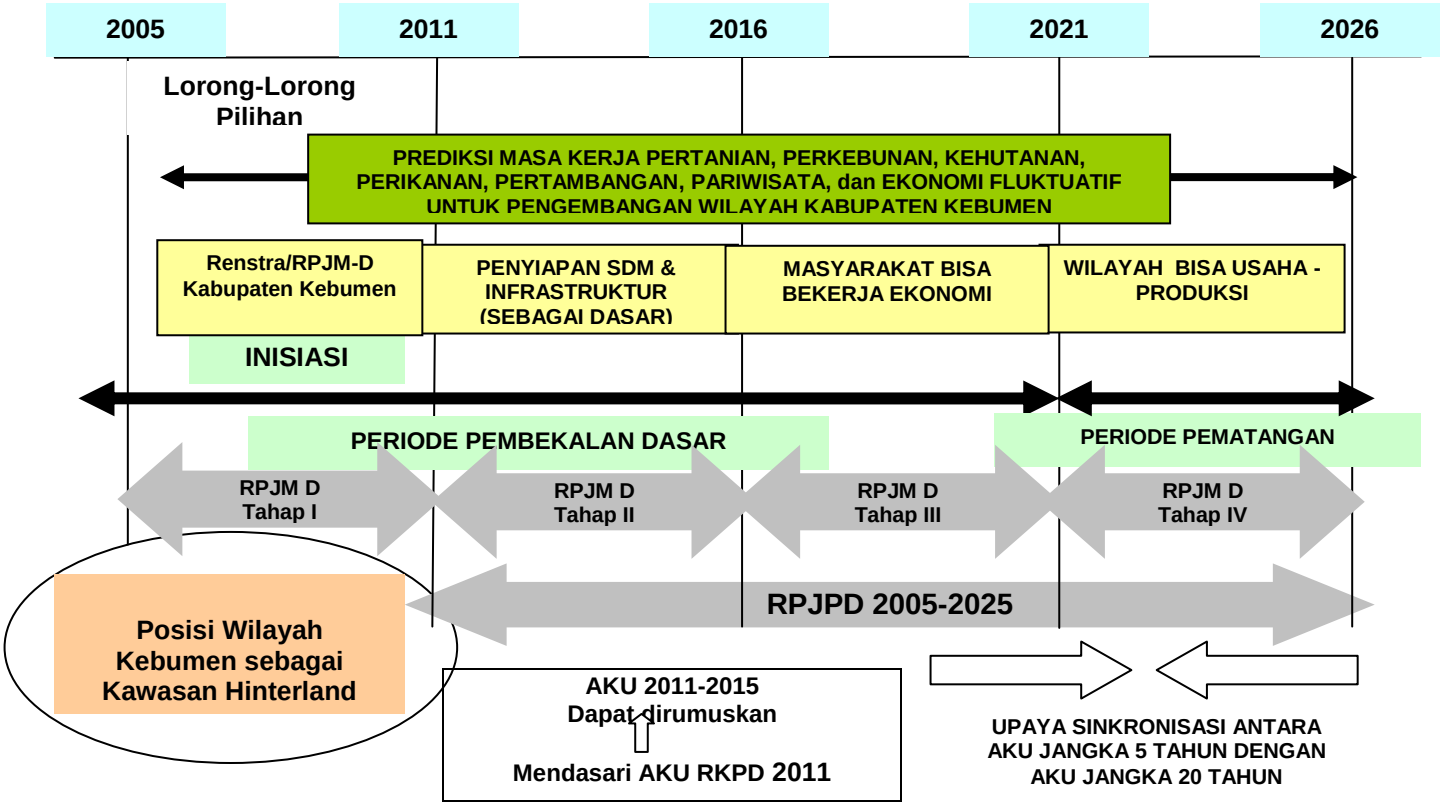
mengembangkan ekonomi kabupatennya. Untuk mencapai hal tersebut, tentu dipersyaratkan sudah memiliki kecerdasan tertentu, masyarakat harus sehat jasmani dan rohani, dapat mengantisipasi serta menghilangkan jerat kemiskinan dengan memanfaatkan interaksi antar kelompok masyarakat, antar bagian wilayah kabupaten dan jaringan kerjasama ekonomi kabupaten secara nasional dan internasional.

5. Ketika masyarakat dan bagian wilayah kabupaten sudah secara bersama-sama melakukan kegiatan ekonomi wilayah yang bertumpu pada pengembangan pedesaan, selanjutnya diharapkan wilayah Kabupaten Kebumen secara sinergis berusaha hidup dengan aktif berproduksi, menjalin interaksi internal dan eksternal, memposisikan diri sebagai simpul jasa koleksi distribusi dalam konteks regional Jawa Tengah bagian selatan-tengah, nasional, dan ASEAN. Wilayah Kabupaten Kebumen yang diibaratkan sudah ”berstatus sarjana” tentu memiliki identitas dan karakter tertentu pilihannya, yaitu simpul yang proaktif dalam konteks kehidupan wilayah yang lebih luas, dalam masa 2021-2025.

6. Berdasarkan skenario yang telah dijabarkan di atas, kehidupan masyarakat dan wilayah Kabupaten Kebumen digambarkan berada dalam suatu impian atau cita-cita. Cita-cita tersebut diharapkan dapat diselaraskan dengan menelaah seperti apa arah kebijakan umum dari arah bawah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang selanjutnya dikembangkan menjadi arah kebijakan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015, dan kemudian diproyeksikan ke arah kebijakan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Secara bersamaan, rumusan makro arah kebijakan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah juga mesti ”dibumikan” untuk dijiwai oleh arah kebijakan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 (arah atas turun ke bawah). Upaya mempertemukan upaya *bottom-up* dan upaya *top-down* ini merupakan suatu seni menciptakan nasib anak bangsa (meramalkan kehidupan anak bangsa pada satuan waktu dan satuan tempat tertentu).

Upaya menciptakan lorong-lorong waktu yang menawarkan berbagai pilihan untuk skenario pengembangan jangka panjang Kabupaten Kebumen dapat dicermati pada gambar 5.1. berikut :

Gambar 5.1. Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen



C. Posisi Strategis Kabupaten Kebumen Dalam Kerangka Skenario Pengembangan Jangka Panjang

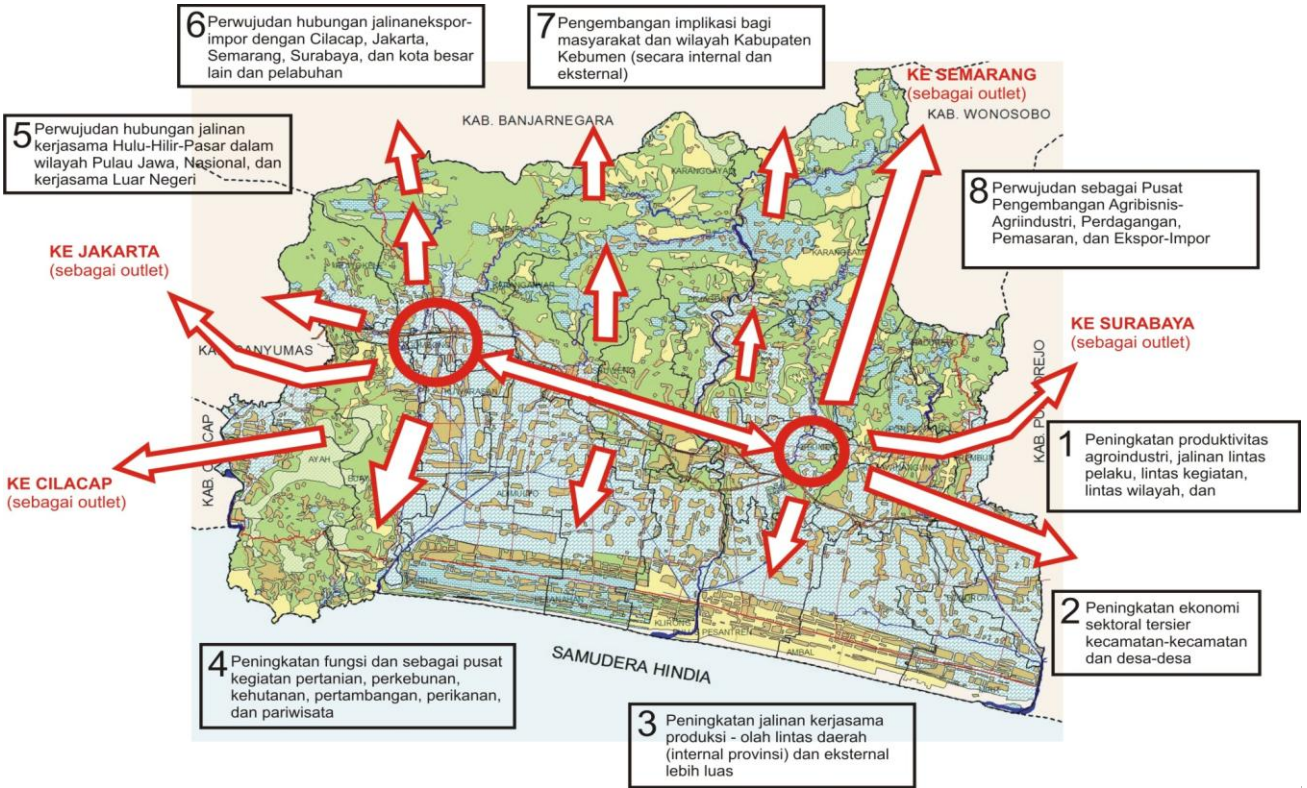
1. Visi Bupati Kabupaten Kebumen saat ini diharapkan dapat bertumpu pada sumber daya manusia yang dirujuk dengan posisi geografis-relatif wilayah Kabupaten Kebumen sebagai daerah belakang/hinterland dalam orientasi kewilayahan Provinsi Jawa Tengah bagian selatan tengah, dengan kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pariwisata, pertambangan, kelautan dan perikanan. Hal ini selanjutnya dipakai sebagai Tujuan pembangunan (Visi membangun) Kabupaten Kebumen saat ini dan jangka panjang. Posisi relatif eksisting adalah sebagai hinterland jasa pelayanan pertanian dan perikanan yang dinamis dengan investasi swasta.
2. Untuk mencapai tujuan/visi ke depan tersebut, diprediksikan ada lorong waktu yang perlu dipilih untuk dilalui.Pemillihan itu didasarkan atas kekuatan posisi hinterland Kabupaten Kebumen dalam perspektif kewilayahan yang lebih luas, yakni sebagai jalur pendorong garis kritikal. Kekuatan ini tercermin dalam tujuh langkah sub-skenario logis-strategis. Sifat kritikal-logis-strategis ini diusung karena merupakan penentu dan

sesuai dengan logika perkembangan wilayah dan strategis dalam menggapai cita-cita masa depan.

3. Dapat digambarkan pada situasi saat ini, posisi wilayah Kabupaten Kebumen merupakan titik awal dan sekaligus sebagai titik tujuan dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda (menjadi cerminan generasi muda ke arah manusia dewasa/matang/lanjut), yaitu: hinterland jasa regional Jawa Tengah/Pulau Jawa/Indonesia/ASEAN.

Penjabaran spasial hubungan antara Kabupaten Kebumen dengan wilayah lebih luas dicermati dalam gambar 5.2, dapat diungkapkan sebagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi wilayah dalam konteks skenario jangka panjang.

Gambar 5.2.
Posisi Strategis Wilayah Kabupaten Kebumen Dalam Kerangka Pangembangan Jangka Panjang



D. Skenario Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

Dalam rangka mencapai visi Kebumen Tahun 2010-2015 berupa "Kebumen yang Modern, Berkepribadian, Makmur dan Sejahtera" telah ditetapkan 4 (empat) butir misi sebagai perincian atas visi sebagai *ultimate goal*. Untuk itu perlu disusun pentahapan pembangunan sebagai *milestones*, atau sebagai tahapan antara dalam pencapaian visi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan prasarana dasar wilayah merupakan sasaran utama yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen. Sedangkan sasaran dalam tahapan-tahapan tahunan lainnya antara lain :

Tahapan I : Tahapan ini merupakan upaya tindak lanjut pencapaian pembangunan jangka menengah Tahun 2006-2010 dan dasar untuk pencapaian pembangunan jangka menengah Tahun 2010-2015. Dalam tahapan dasar pembangunan jangka menengah ini, upaya yang akan dilaksanakan adalah penguatan kelompok ekonomi keluarga dan desa.

Tahapan II : Dalam periode kedua ini, upaya yang akan dicapai adalah peningkatan kelembagaan yang ada serta peningkatan produksi untuk agribisnis-agroindustri.

Tahapan III : Upaya yang akan dilaksanakan adalah penguatan kelompok usaha bersama kecamatan serta penyiapan jaringan kerja untuk upaya pemasaran.

Tahapan IV : Dalam tahapan ini akan dilaksanakan upaya penyiapan kelembagaan kerjasama lintas daerah serta penguatan kelompok wirausaha kabupaten.

Tahapan V : Tahapan terakhir pembangunan jangka menengah ini akan diupayakan penjalinan kerja ekspor impor untuk bisa menjalin pemasaran lebih luas serta penguatan pengembangan ekonomi daerah.

Gambar 5.3. Penafsiran Skenario Pengembangan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015



BAB VI
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, visi misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan visi misi Kepala Daerah terpilih. Visi dan misi kepala daerah yang disampaikan saat pencalonan atau masa kampanye pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Kebumen. Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan masyarakat di Kabupaten Kebumen dilakukan dengan pendekatan sosial dan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kebumen yang makmur dan sejahtera. Pendekatan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menitikberatkan pada kestabilan kondisi sosial di dalam masyarakat dengan mengurangi ketimpangan pada golongan masyarakat kecil.

Dalam rangka mencapai keinginan tersebut, dirumuskan Visi Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

”Kebumen Yang Modern, Berkepribadian,
Makmur dan Sejahtera”

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan pengertian terhadap variabel yang terdapat dalam visi di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

Modern : adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman, yang difokuskan pada tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Local Government*), ditandai dengan penerapan sistem administrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang profesional, sehingga tercipta pelayanan publik yang prima.

Berkepribadian : adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap masyarakat Kabupaten Kebumen. Sifat ini merupakan jati diri masyarakat Kabupaten Kebumen yang berbudaya, religius dan mandiri.

Makmur : adalah keadaan kehidupan daerah yang masyarakatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya;

Sejahtera : adalah kondisi dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan akan hak-hak dasarnya, meliputi hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Semua kondisi ideal yang hendak dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun ini, diwujudkan dengan berbasis agrobisnis, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

B. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun misi yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Alur pikir penyusunan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 adalah :

1. Misi merupakan tahapan rencana pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang berorientasi pada peningkatan

kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di dalam segala bidang menuju masyarakat yang modern, berkepribadian, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan pendidikan yang terjangkau, termasuk pendidikan keagamaan, kesehatan dengan menekankan upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ekonomi yang efektif dan efisien, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktifitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi lokal

untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antarwilayah, melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

2. Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan diatasi secara bertahap seperti aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan

memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Kebumen yang modern, berkepribadian, makmur, dan sejahtera maka visi di atas dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat;
2. membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya;
3. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat; dan
4. memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional demi kesejahteraan rakyat.

C. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Misi kesatu, mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima, dengan sasaran antara lain:

a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparat, dengan indikator sebagai berikut :
    1) Persentase Tingkat Pendidikan Aparat;
    2) Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
    3) Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai; dan
    4) Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan.
b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, dengan indikator sebagai berikut:
    1) Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    2) Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik; dan
    3) Kesesuaian kapasitas sumber daya manusia dengan kapasitas jabatan.
c. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi kebijakan publik, dengan indikator sebagai berikut:
    1) Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

2) Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat;
3) Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki jaringan berbasis *Local Area Network*.

d. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, dengan indikator sebagai berikut :
1) Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
2) Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui Selamat Pagi Kebumen dan *Short Message Service*);
3) Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan Nomor Induk Kependudukan);
4) Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen;
5) Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa;
6) Meningkatnya persentase Desa Berkembang; dan
7) Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah.

e. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, dengan indikator sebagai berikut :
    1) Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah; dan
    2) Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah.
f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, dengan indikator sebagai berikut :
    1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah langsung; dan
    2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa.
g. Meningkatnya sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan, dengan indikator sebagai berikut
    1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan; dan
    2) akurasi dan kontinuitas data perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah.
h. Meningkatnya kesiapan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dengan

segala dampaknya, dengan indikator persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana alam.

Misi kedua, membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya, mempunyai tujuan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan, dengan sasaran sebagai berikut :
    a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang ingin dicapai antara lain :
        1) Usia Harapan Hidup;
        2) Mengurangi Tingkat Kematian Anak;
        3) Mengurangi Angka Kematian Balita;
        4) Meningkatkan Kesehatan Ibu;
        5) Penanganan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) dan penyakit menular lainnya;
        6) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil;
        7) Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani;

8) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
9) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas;
10) Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani;
11) Cakupan Kunjungan Bayi;
12) Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) atau tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi;
13) Cakupan Pelayanan Anak Balita;
14) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu Usia 6-24 bulan bagi Keluarga Miskin;
15) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan;
16) Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa Sekolah Dasar;
17) Cakupan Peserta Keluarga Berencana Aktif;
18) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit;
    a) *Acude Flaccid Paralysis* (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia di bawah 15 tahun;
    b) Penemuan penderita Pneumonia Balita;
    c) Penemuan pasien baru TB BTA Positif;

d) Penderita DBD yang ditangani; dan
e) Penemuan penderita diare.

19) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin;
20) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin;
21) Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yang harus diberikan;
22) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam; dan
23) Cakupan Desa Siaga Aktif.

b. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin secara bertahap, dengan indikator persentase cakupan pelayanan Jamkesda;
c. Terlaksananya Pendidikan Untuk Semua, dengan indikator antara lain :
   1) Angka Partisipasi Kasar Laki-Laki;
   2) Angka Partisipasi Kasar Perempuan;
   3) Angka Partisipasi Murni Laki-Laki;
   4) Angka Partisipasi Murni Perempuan;
   5) Angka Melek Huruf; dan

6) Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

d. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan indikator antara lain :
   1) Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal;
   2) Keterlakasanaan Kurikulum Nasional dan Lokal;
   3) Angka Putus Sekolah;
   4) Persentase Kelulusan;
   5) Lulusan yang Melanjutkan;
   6) Rasio Guru dengan Siswa;
   7) Guru sesuai dengan kompetensi;
   8) Sarana dan Prasarana;
   9) Sekolah menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

e. Terwujudnya pendidikan yang terjangkau bagi Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum Negeri secara bertahap, dengan indikator antara lain :
   1) Persentase Kenaikan Beasiswa bagi siswa miskin; dan
   2) Tersusunnya Regulasi tentang biaya pendidikan.

f. Meningkatnya kreativitas dan prestasi di bidang seni, budaya, kepemudaan dan olahraga, dengan indikator antara lain :
   1) Peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga; dan

2) Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan.

2. Meningkatkan Keberdayaan, Perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Menurunnya Angka Kemiskinan, dengan indikator menurunnya angka kemiskinan; dan
   b. Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan indikator persentase proporsi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap jumlah penduduk.
3. Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya rasio siswa, angkatan kerja dan rasio melek huruf perempuan dibanding laki-laki, dengan indikator kenaikan *Gender Development Index*; dan
   b. Meningkatnya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator antara lain :
      1) Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan;
      2) Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak; dan

3) Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

4. Meningkatnya kualitas keagamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata, dengan sasaran sebagai berikut :
    a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah, dengan indikator meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan; dan
    b. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan.

Misi ketiga, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, mempunyai tujuan antara lain :

1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berdasarkan keunggulan kompetitif lokal, dengan sasaran sebagai berikut :
    a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Indikator yang ingin dicapai antara lain :

1) Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto atas dasar harga konstan sektor pertanian;
2) Tingkat penggunaan teknologi tepat guna;
3) Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan; dan
4) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

b. Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan, dengan indikator tingkat perkembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
c. Meningkatnya kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto atas dasar harga konstan sektor industri; dan
d. Mengembangkan dan meningkatkan daya jual potensi wisata, dengan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Mewujudkan jaringan infrastruktur yang baik dan terintegrasi untuk mendukung perkonomian, dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkesinambungan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas infrastruktur secara

bertahap dan berkesinambungan, dengan indikator antara lain :

a. Ketersedian Jaringan Jalan dan jembatan;
b. Prasarana Jalan dengan kondisi baik;
c. Prasarana Jembatan dengan kondisi baik;
d. Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik;
e. Persentase tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air;
f. Cakupan jaringan listrik perdesaan; dan
g. Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik.

3. Mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam untuk mendukung kualitas sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari, dengan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, indikator yang ingin dicapai antara lain :
    1) Persentase rasio sampah terangkut dengan produksi sampah;
    2) Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
    3) Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup; dan

4) Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Lingkungan Hidup.

b. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pertanahan, indikator yang ingin dicapai antara lain :
   1) Tersusunya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
   2) Tingkat Kesesuaian Lahan dengan Rencana Umum Tata Ruang.

c. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, indikator yang ingin dicapai adalah persentase rumah layak huni.

Misi keempat, memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional demi kesejahteraan rakyat, bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhah ekonomi melalui kemitraan pembangunan, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kerjasama antar daerah, dengan indikator jumlah kerjasama antar daerah;
   b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan, dengan indikator antara lain :
      1) angka pertumbuhan ekonomi; dan
      2) angka ketimpangan distribusi pendapatan (*Index Gini*).

c. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, dengan indikator Produk Domestik Regional Brutto per kapita.

2. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi baik pembangunan lokal, regional maupun nasional, dengan sasaran antara lain :
   a. Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa, dengan indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran;
   b. Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan, dengan indikator jumlah klaster yang terbentuk;
   c. Meningkatnya nilai investasi pembangunan, dengan indikator peningkatan jumlah dan nilai investasi;
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan sasaran antara lain:
   a. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan indikator
      1) Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja; dan
      2) Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja;

b. Meningkatnya fungsi Balai Latihan Kerja, dengan indikator persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja.

Lebih lengkap mengenai misi, tujuan, sasaran dan target indikator kinerja yang ingin dicapai dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015
Sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI	TARGET 2015
MISI I MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERPIHAK PADA RAKYAT	1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima	a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparat	1) Persentase Tingkat Pendidikan Aparat : SMA; D3; S1 dan S2	SD-SMA 38,2%, D3 5,8%, S1 23,2%, S2 0,59%	SD-SMA 5%, D3 5%, S1 80%, S2 10%
			2) Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat	40%	80%
			3) Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai	0,2%	2%
			4) Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan	2,5%	30%
		b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1) Persentase SKPD yang menyusun SAKIP	30%	70%
			2) Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik	1%	1%
			3) Kesesuaian kapasitas SDM dengan kapasitas jabatan	60%	90%
		c. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi kebijakan publik	1) Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP	0%	100%
			2) Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat	40%	60%
			3) Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	4 Buah	10 Buah
			4) SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	28 SKPD	40 SKPD
		d. Meningkatnya tertib administrasi	1) Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	9%	10%

		pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2) Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	70%	100%
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI	TARGET 2015
			3) Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK)	50%	80%
			4) Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen	100%	100%
			5) Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	20%	50%
			6) Meningkatnya persentase desa berkembang	52 Desa	100 Desa
			7) Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah	0%	100%
		e. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1) Persentase kenaikan PAD	24%	38%
			2) Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	25%	85%
		f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat	1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung	65%	72%
			2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	70%	80%
		g. Meningkatnya sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan	1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan	75%	100%
			2) Akurasi dan kontinuitas data jangka menengah dan tahunan	80%	100%

		h. Meningkatnya kesiapan Pemkab dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dengan segala dampaknya	1) Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	75%	100%
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI	TARGET 2015
MISI II MEMBINA DAN MELESTARIKAN KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA	1. Meningkatkan kualitas SDM sebagai sumber daya utama pembangunan	a. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1) Usia Harapan Hidup	70,3 Tahun	70,8 Tahun
			2) Mengurangi Tingkat Kematian Anak	5,02/1000 Kelahiran Hidup	5/1000 Kelahiran Hidup
			3) Mengurangi Angka Kematian Balita	9,4/1000 Kelahiran Hidup	9,0/1000 Kelahiran Hidup
			4) Meningkatkan Kesehatan Ibu/ Angka Kematian Ibu Melahirkan	49,26/100.000 Kelahiran Hidup	49/100.000 Kelahiran Hidup
			5) Penanganan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya	100%	100%
			6) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	90%	95%
			7) Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani	58,5%	80%
			8) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	100%
			9) Cakupan Pelayan Ibu Nifas	84%	90%
			10) Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	60%	85%
			11) Cakupan Kunjungan Bayi	84%	92%
			12) Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100%	100%
			13) Cakupan Pelayanan Anak Balita	78%	87%
			14) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Usia-6-24 bulan bagi Keluarga Miskin	100%	100%

			15) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100%	100%
			16) Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD	100%	100%
			17) Cakupan Peserta KB Aktif	61%	66%
			18) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit :		
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI	TARGET 2015
			a) Acude Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk berusia < 15 tahun	≥ 2/100.000 penduduk berusia < 15 tahun
			b) Penemuan penderita Pneumonia Balita	100%	100%
			c) Penemuan pasien baru TB BTA Positif	65%	70%
			d) Penderita DBD yang ditangani	100%	100%
			e) Penemuan penderita diare	100%	100%
			19) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	100%
			20) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	100%	100%
			21) Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	100%	100%
			22) Cakupan Desa/Kel mengali KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	100%
			23) Cakupan Desa Siaga Aktif	85%	85%
		b. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin secara bertahap	1) Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda	0,19%	0,42%

		c. Terlaksananya Pendidikan Untuk Semua	1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki	PAUD 41,94%, SD/MI 103,85%, SMP/MTs, 98,20%, SMA/MA 56,67%	PAUD 51,68%, SD/MI 104,40%, SMP/MTs 98,92%, SMA/MA 60,67%
			2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan	PAUD 42,98%, SD/MI 100,88%, SMP/MTs, 96,65%, SMA/MA 60,77%	PAUD 52,96%, SD/MI 101,42%, SMP/MTs 97,34%, SMA/MA 61,79%
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI	TARGET 2015
			3) Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-Laki	SD/MI 96,60%, SMP/MTs 83,17%, SMA/MA/SMK 42,68%	SD/MI 103,65%, SMP/MTs 105,11%, SMA/MA/SMK 61,83%
			4) Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan	SD/MI 95,22%, SMP/MTs 72,14%, SMA/MA/SMK 41,85%	SD/MI 102,17%, SMP/MTs 91,17 %, SMA/MA/SMK 60,63%
			5) Angka Melek Huruf	98%	100%
			6) Rata-Rata Lama Sekolah	6,85 tahun	6,9 tahun
		d. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1) Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal	56%	80%
			2) Keterlakasanaa Kurikulum Nasional dan Lokal	58%	80%
			3) Angka Putus Sekolah (APS)	SD/MI 0,13, SMP/MTs 0,57, SMA/MA/SMK 2,43	SD/MI 0,3, SMP/MTs 0,39, SMA/MA/SMK 1,8
			4) Persentase Kelulusan	SD/MI 100%, SMP/MTs 92,77%, SMA/MA/SMK 89,59%	SD/MI 100%, SMP/MTs 94%, SMA/MA/SMK 95%
			5) Lulusan yang Melanjutkan	SD/MI 100,79%, SMP/MTs 91,78%	SD/MI 100,79%, SMP/MTs 91,78%
			6) Rasio Guru dengan Siswa (TK)	SD/MI 1:18, SMP/MTs 1:18, SMA/MA/SMK 1:13	SD/MI 1:25, SMP/MTs 1:20, SMA/MA/SMK 1:17
			7) Kesesuaian guru sesuai dengan Kompetensi	SD/MI 88,18%, SMP/MTs 80,95%, SMA/MA/SMK 75,77%	SD/MI 92%, SMP/MTs 93%, SMA/MA/SMK 93%
			8) Peningkatan sarana dan prasarana	65%	94%

			pendidikan, termasuk perpustakaan		
			9) Sekolah menerapkan MPMBS	SD/MI 50%, SMP/MTs 70%, SMA/MA/SMK 75%	SD/MI 93%, SMP/MTs 94%, SMA/MA/SMK 95%
		e. Terwujudnya pendidikan yang terjangkau bagi SD hingga SMU secara bertahap	1) Persentase kenaikan beasiswa bagi siswa miskin	20%	30%
			2) Tersusunnya Regulasi tentang biaya pendidikan	50%	100%
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI	TARGET 2015
		f. Meningkatnya kreativitas dan prestasi di bidang seni, budaya, kepemudaan dan olahraga	1) Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	Nasional 2 medali emas, Provinsi 15 Medali	Nasional 5 medali emas, Provinsi 25 Medali
			2) Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan	14 Organisasi	14 Organisasi
	2 Meningkatkan Keberdayaan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	a. Menurunnya Angka Kemiskinan	1) Turunnya angka kemiskinan	25,73%	15,45%
		b. Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1) Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	25%	30%
	3 Mendukung Keseta-raan Gender dan Pemberdayakan Perempuan dan Anak	a. Meningkatnya rasio siswa, angkatan kerja, dan rasio melek huruf perempuan/laki-laki	1) Kenaikan *Gender Development Index* (GDI)	0,8	10
		b. Meningkatnya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1) Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	84 Kasus	100 Kasus
			2) Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	34 Kasus	50 Kasus
			3) Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	0%	100%

	4.	Meningkatnya kualitas keagamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata	a.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah	1)	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	27%	54%
			b.	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat	1)	Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	10%	10%
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI	TARGET 2015
MISI III MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT	1.	Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berdasarkan keunggulan kompetitif lokal	a.	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas produksi pertanian	1)	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	14,01%	20%
					2)	Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	60%	80%
					3)	Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan	30%	55%
					4)	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	65%	66%
			b.	Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan	1)	Tingkat perkembangan kelompok tani	1315 Kelompok	1450 Kelompok
			c.	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap kesejateraan masy.	1)	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	4,03%	5,5%
			d.	Mengembangkan dan meningkatkan daya jual potensi wisata	1)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,032%	3%
	2.	Mewujudkan jaringan infrastruktur yang baik dan terintegrasi untuk	a.	Meningkatnya kualitas infrastruktur secara bertahap dan	1)	Ketersedian Jaringan Jalan dan jembatan	Jalan 615,2 km; Jembatan 316 Unit	Jalan 655,2 km; Jembatan 326 Unit
					2)	Prasarana Jalan dengan kondisi baik	375,2 km	458,64 km

	mendukung perkonomian	berkesinambungan	3) Prasarana Jembatan dengan kondisi baik	265 Unit	293 Unit
			4) Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik	50%	73%
			5) Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	50%	73%
			6) Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan	67%	75%
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI	TARGET 2015
			7) Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	60%	80%
	3. Mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA untuk mendukung kualitas sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari	a. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup (MDGs)	1) Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah	42%	50%
			2) Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	60%	73%
			3) Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	75%	90%
			4) Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	90%	100%
		b. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pertanahan	1) Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah	90%	100%
			2) Tingkat Kesesuaian Lahan dengan RUTR	75%	75%
		c. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1) Persentase Rumah Layak Huni	7,7%	27%
MISI IV MEMPERLUAS JARINGAN SOSIAL-EKONOMI	1. Meningkatkan pertumbuhah ekonomi melalui kemitraan pembangunan	a. Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	1) Jumlah kerjasama antar daerah	2	3
		b. Meningkatnya pertumbuhan	1) Angka Pertumbuhan Ekonomi	3,9%	7%

SECARA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT		ekonomi yang disertai dengan pemerataan	2) Angka Ketimpangan Distribusi Pendapatan (*Index Gini*)	0,2	0,16
		c. Meningkatnya pendapatan Masyarakat	1) PDRB per kapita	4,7 Juta	6,25 Juta
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI	TARGET 2015
	2. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi baik pembangunan lokal, regional maupun nasional	a. Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa	1) Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	3,6%	5,4%
		b. Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan	1) Jumlah Klaster yang terbentuk	4 Kluster	6 Kluster
		c. Meningkatnya nilai investasi pembangunan	1) Peningkatan jumlah dan nilai investasi	9,26%	12,37%
	3 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	a. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1) Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	3.500 Orang	25.000 Orang
			2) Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	0%	100%

		b. Meningkatnya fungsi Balai Latihan Kerja	1) Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausa-haan di Balai Latihan Kerja	10%	27%

BAB VII
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Strategi Pembangunan Daerah

Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan daerah selama ini, berpengaruh pada proses pembangunan daerah di masa yang akan datang. Jika permasalahan itu belum dapat diatasi, maka keseluruhan upaya untuk mewujudkan tujuan akhir kehidupan rakyat yang sejahtera, akan menabrak dinding "keniscayaan", menumbuhkan kesenjangan-kesenjangan pembangunan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Menghadapi permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka diperlukan beberapa strategi pembangunan di masa depan. Strategi Pembangunan dirumuskan berdasarkan orientasi kebijakan untuk mengimplementasikan program Kepala Daerah, sekaligus sebagai payung yang menaungi perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi. Dengan kata lain untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kebumen, diperlukan strategi yang dianggap ampuh dan jitu

untuk menerjemahkan secara strategis makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya. Strategi-strategi pembangunan daerah yang diyakini bisa dan mampu menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Strategi optimalisasi potensi sumber daya manusia dan aparatur yang telah dimiliki serta meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan pemberian *reward and punishment* serta penegakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance*;

   Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu penting yang paling mengemuka dalam teori dan praktek penyelenggaraan administrasi publik, di mana perkembangan paradigma yang ada saat ini mengarah pada pergeseran dari *rule government* menjadi *good governance*. Mewujudkan *good governance* tidak hanya sekedar masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memperbaiki sikap, perilaku dan etika semua pemangku kepentingan pembangunan, dalam hal ini baik itu pemerintah itu sendiri, masyarakat, dan dunia usaha/swasta.

Efektivitas dan efisiensi dalam penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi yang baik antara manajemen sektor publik, swasta dan masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai pencipta lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menyediakan kesempatan dan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

2. Strategi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap

pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan 1 (satu) faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk pondasi ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi

Perbaikan struktur ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang

makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan daerah dalam memadukan sumber daya alam (*resource based*), ilmu pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*). Dengan cara itu, akan diperoleh pembangunan ekonomi produktif yang makin luas, antara lain ekonomi kreatif (*creative economy*), yang dapat memberikan peran konstruktif untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah.

Program peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Upaya-upaya menggerakkan sektor riil telah dan akan terus dilakukan melalui berbagai intervensi pemerintah yang konstruktif dan terukur. Kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil

apabila didukung oleh birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Strategi Peningkatan Keterkaitan Wilayah dan Aglomerasi

Kemampuan daerah untuk mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa adalah komponen pembangunan ekonomi yang penting. Suatu wilayah perlu memiliki akses transportasi menuju pasar secara lancar. Jalur jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan kota-kota lebih besar merupakan prasarana utama bagi pengembangan ekonomi wilayah. Pemeliharaan jaringan jalan diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang. Pembangunan prasarana diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Mengenali kebutuhan pergerakan yang sebenarnya perlu dilakukan dalam merencanakan pembangunan transportasi.

Umumnya usaha yang sama cenderung beraglomerasi dan membentuk kelompok usaha dengan karakter yang sama serta tipe tenaga kerja yang sama. Produk dan jasa yang dihasilkan juga satu tipe. Sumber

daya alam dan industri pertanian biasanya berada di tahap awal pembangunan wilayah dan menciptakan kesempatan yang potensial untuk perkembangan wilayah. Pengelompokan usaha (aglomerasi) berarti semua industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan keuntungan. Pengelompokan itu juga menciptakan potensi untuk menciptakan jaringan kerjasama yang dapat membangun kegiatan pemasaran bersama dan untuk menarik kegiatan lainnya yang berkaitan ke depan atau ke belakang.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat penting jika suatu wilayah ingin bersaing di pasar lokal dan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan kawasan yang terpadu diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Prioritas utama adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang menunjukkan tanda-tanda aglomerasi dengan seluruh kegiatan dan institusi yang membentuknya. Kemungkinan kawasan ini menjadi pusat usaha dan perdagangan tergantung pada jaringan transportasi yang baik, prasarana yang lengkap, tempat kerja yang mudah dicapai, dukungan modal, dan kesempatan pelatihan/pendidikan.

Posisi geografis yang menjadi penghubung antar Provinsi dan antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, menjadikan Kebumen memliki potensi sebagai kota transit. Baik dalam perjalanan jarak sedang Yogyakarta - Purwokerto, maupun perjalanan jarak jauh Jakarta/Bandung - Surabaya. Identitas itu harus lebih dimantapkan dengan penyediaan sarana transit yang memadai, khususnya menyangkut sarana prasarana penunjang seperti fasilitas *rest area* (daerah khusus untuk istirahat), sarana hotel/penginapan, sarana rekreasi, dan terutama pembangunan/peningkatan infrastruktur jalan.

Lebih dari itu, Kebumen harus mulai mencanangkan diri sebagai "*more than a transit city*". Jika Kebumen mampu menahan para transiter memperpanjang waktu transit menjadi lebih lama atau bahkan menginap, maka banyak *multiplier efect* yang bisa dipetik darinya. Setidaknya, segala usaha yang terkait dengan jasa wisata, jasa boga, dan kerajinan bisa meraih pendapatan yang lebih baik. Dan itu besar artinya untuk menyumbang angka pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat Kabupaten Kebumen.

4. Strategi Penataan Berkelanjutan

Perubahan internal dan eksternal yang dinamis menuntut kemampuan semua pihak terutama masyarakat memiliki daya saing tinggi, terutama dalam melakukan adaptasi pada setiap level perubahan internal dan eksternal dimaksud. Dengan demikian proses pembangunan sebelumnya tidak bisa di abaikan begitu saja, melainkan sebagai titik tumpu melakukan loncatan pada pembangunan pada masa datang.

Strategi dan sekaligus agenda besar ini ditujukan untuk membangun Kabupaten Kebumen di segala bidang kehidupan antara lain ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, lingkungan, dan keamanan. Sistem penataan ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum yang berkelanjutan ini akan mampu menjadi landasan pembangunan untuk mencapai pemerintahan bersih, membangun masyarakat yang sejahtera dan menciptakan kemandirian wilayah. Sistem pemerintahan daerah ke depan harus mampu menghadapi berbagai perubahan sehingga dapat menghindarkan diri dari ketimpangan. Di atas penataan sistem yang berkelanjutan tersebut kita kembangkan suatu sistem peningkatan kapasitas dan

kemampuan masyarakat. Hal-hal yang terdesak untuk ditata di masa akan datang itu antara lain adalah:

a. Pencapaian keseimbangan pembangunan desa dan kota;
b. Penyelenggaraan otonomi desa;
c. Penguatan ekonomi melalui sektor-sektor ril dengan melibatkan teknologi industri ramah lingkungan;
d. Optimalisasi aset-aset pemerintah dalam memobilisasi ekonomi masyarakat;
e. Peningkatan standar kesadaran hukum untuk menciptakan *legal culture* (budaya taat hukum);
f. Pencapaian kesetaraan laki-laki dan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya;
g. Penciptaan Clean and Good Governance;
h. Penguatan lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan, distribusi seimbang pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan mutu hidup dan mutu manusia; dan
i. Pembinaan institusi kontrol dalam masyarakat.

5. Strategi Penciptaan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Strategi selanjutnya yang harus ditempuh dalam pemerintahan akan datang adalah penciptaan landasan pembangunan yang kokoh dan kuat. Jika landasan pembangunan rapuh maka dapat dipastikan terjadi keruntuhan bangunan kemasyarakatan yang hendak diwujudkan bersama. Sementara untuk masa-masa akan datang masyarakat Kebumen mendatang berhak memperoleh keadaan yang lebih baik dari saat ini. Pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun sebelumnya telah cukup memberikan dasar acuan untuk memperkokoh terciptanya kondisi lebih baik di masa yang akan datang.

Pembangunan di Kabupaten Kebumen harus berlangsung secara berkelanjutan, dengan catatan harus lebih memberikan ruang leluasa terhadap pilihan-pilihan yang lebih luas bagi setiap masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera dan mandiri, serta pemerintahan yang bersih. Ruang gerak dan pilihan-pilihan yang dimiliki rakyat akan semakin terbuka apabila:

a. Ekonomi rakyat kuat, merata, tumbuh dengan cepat;

b. Adanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, jaminan dan kepastian hukum; dan
c. Kapasitas diri dan kualitas kehidupan rakyat yang tinggi.

B. Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kebumen selama periode Tahun 2010-2015 berdasarkan urusan pemerintahan.

Misi kesatu : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berpihak Kepada Rakyat.

Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Urusan Perencanaan Pembangunan
   a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas perencanaan partisipatif yang pro rakyat;
   b. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan; dan
   c. Meningkatkan kualitas pelaporan dan pengendalian pembangunan.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan daerah
Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan dunia usaha/lembaga
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Pengembangan wilayah perbatasan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah
Program Perencanaan Sosial Budaya	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya daerah

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

2. Urusan Pertanahan

   Mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib dan lancar.

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

3. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

   Penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh.

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pendataan dan Perkembangan Kependudukan	Peningkatan pelayanan adiministrasi kependudukan

Penataan Administrasi Kependudukan	Penyusunan data base kependudukan
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan pelayanan publik dalam pencatatan sipil
Program Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelatihan tenaga pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Peningkatan ketertiban administrasi kependudukan

4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
   a. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, dinamis dan bersatu yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika dan moral;
   b. Meningkatkan kemandirian institusi-institusi sosial dan politik pada tataran suprastruktur dan infrastruktur politik sebagai unsur perekat, pemelihara dan pengaman kondusifitas daerah; dan
   c. Mengembangkan wawasan kebangsaan yang mengarah kepada terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan bangsa.

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan wawasan kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

5. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
   a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan

struktur yang proporsional serta penerapan reward dan punishment berbasis kinerja;

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik pada setiap satuan kerja perangkat daerah;
c. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif daerah;
d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan profesional;
e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketertiban dan keamanan serta satuan perlindungan masyarakat; dan
f. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pemberian insentif berbasis kinerja.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan pengelolaan kebijakan perberasan
Program Penataan Daerah	Fasilitasi percepatan tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah	Peningkatan sosialisasi program bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta bidang lingkungan hidup dan pertambangan energi kepada masyarakat
Program Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan penatanaan kelembangaan organisasi perangkat daerah
Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan penataan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah
Program Pembinaan dan Supervisi Ketatalaksanaan	Peningkatan pelaksanaan pelayanan publik
Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Peningkatan penataan pendayagunaan aparatur daerah
Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan pendidikan kedinasan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan usaha pembinaan dan pengembangan aparatur

6. Urusan Statistik

   Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Penyusunan dan pengembangan data/informasi/statistik daerah

7. Urusan Kearsipan

Meningkatkan mutu dan kinerja penyelenggaran dan pengelolaan kearsipan daerah menuju tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Peningkatan sistem administrasi kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Peningkatan sistem pengamanan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan kualitas pelayanan informasi

8. Urusan Komunikasi dan Informatika

Menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Pendataan bidang informasi dan komunikasi
Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Peningkatan kerjasama informasi dan media massa

Misi kedua : Membina dan Melestarikan Kehidupan Sosial dan Kemasyarakatan yang Agamis dan Berbudaya.

Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pendidikan
    a. Menetapkan kebijakan pendidikan murah dan terjangkau bagi masyarakat terutama bagi keluarga kurang mampu laki-laki dan perempuan;
    b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
    c. Rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun;
    d. Mendukung pelayanan pendidikan untuk semua (PUS) termasuk di dalamnya untuk anak yang berkebutuhan khusus.
    d. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
    e. Mengembangkan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan informal berbasis potensi daerah;
    f. Mengembangkan sekolah kejuruan berbasis kompetensi.

    Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Program Pendidikan Menengah	1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Menengah 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Menengah.
Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Peningkatan mutu dan informasi pendidikan non formal dan informal
Program Pendidikan Luar Biasa	1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Luar Biasa 2. Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan

2. Urusan Kesehatan
   a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak;
   b. Mengembangkan sistem jaminan kesehatan;
   c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular;
   d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Peningkatan mutu, pemerataan dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 2. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat 2. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan pengawasan obat dan makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Peningkatan mutu dan pengembangan obat asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan promosi, teknologi komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan masayarakat dalam menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat 2. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan usaha perbaikan gizi masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Percepatan upaya pencapaian lingkungan sehat 2. Pengembangan sarana air bersih dan sanitasi
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2. Peningkatan usaha, pelayanan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1. Pembangunan, pengadaan, rehabilitasi dan pengembangan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 2. Peningkatan standar mutu pelayanan rumah sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Upaya Kesehatan Perorangan	Peningkatan upaya kesehatan perorangan

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;
   b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Penyusunan, advokasi dan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Pengarus-utamaan Gender

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyusunan, advokasi dan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	1. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan 2. Peningkatan kapasitas lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

4. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Keluarga Berencana	1. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana 2. Pengadaan sarana pelayanan Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja

Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan dan pengadaan alat kontrasepsi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Fasilitasi pembentukan kelom-pok masyarakat peduli Keluarga Berencana
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling serta fasilitasi forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial termasuk HIV/AIDS	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU

5. Urusan Sosial

   a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat;

   b. Meningkatkan penggalian potensi sumber kehidupan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	1. Penurunan jumlah fakir miskin 2. Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar	1. Pembangunan sarana dan prasarana penampungan anak terlantar; 2. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1. Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma; 2. Pengembangan bakat dan keterampilan para penyandang cacat dan trauma.
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	1. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo; 2. Pengembangan bakat dan keterampilan para penghuni panti asuhan/ jompo.
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Pekerja Seks Komersial, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	1. Pembangunan sarana dan prasarana pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial; 2. Pengembangan bakat dan keterampilan serta pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial

6. Urusan Kebudayaan

   a. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;

b. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparatur pemerintah maupun seluruh unsur masyarakat;
c. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang selaras dengan perkembangan zaman; dan
c. Mengembangkan jenis dan bentuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat.
d. Memantapkan kerjasama antara umat beragama dan pemerintah;
e. Pengembangan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama;
f. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan pengembangan nilai budaya daerah
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan dan pembinaan keragaman budaya daerah
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia swasta dalam pelestarian budaya daerah

7. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
   a. Meningkatkan kontribusi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   b. Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional;
   c. Penyediaan sarana prasarana dan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pengembangan sistem dan penyusunan kebijakan peran kepemudaan dalam pembangunan daerah
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pengembangan sistem dan penyusunan kebijakan pem-bangunan olahraga daerah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   a. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;

   b. Menumbuhkan semangat kemandirian dan gotong royong masyarakat.

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Peningkatan keterampilan masyarakat desa di bidang ekonomi

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1. Pembinaan kelompok masyarakat dan pemberian stimulan pembangunan desa; 2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Pelatihan aparatur pemerintah desa; 2. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

9. Urusan Perpustakaan

   a. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;

   b. Meningkatkan kemampuan dan budaya masyarakat dalam membaca.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	1. Peningkatan dan pengembangan minat dan budaya baca masyarakat; 2. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan.

10. Urusan Ketransmigrasian

    Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan ketransmigrasian baik di dalam maupun ke luar Kabupaten Kebumen.

    Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia
Program Transmigrasi Lokal	Penyuluhan dan pelatihan transmigrasi lokal
Program Transmigrasi Regional	Penyuluhan dan pelatihan transmigrasi regional

Misi ketiga : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah untuk Kemakmuran Rakyat.

Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Urusan Pekerjaan Umum
    a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;

b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; dan
d. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Penyusunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Pengadaan dan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana prasarana kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	1. Perencanaan, pembangunan dan rehabiliasi/pemelihara-an jaringan pengairan;

	2. Pemberdayaan petani pemakai air.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1. Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa; 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.
Program Pengembangan, Penge-lolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya	1. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan penampung dan kawasan tangkapan air; 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana pengelolaan air minum dan air limbah; 2. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.
Program Pengendalian Banjir	1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pengendali banjir;

	2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perencanaan dan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program Pembangunan Infrastruk-tur Perdesaan	Penataan, pembangunan, dan rehabilitasi infrastruktur perdesaan

2. Urusan Perumahan Rakyat
   a. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara; dan
   b. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan Perumahan	1. Penyusunan kebijakan, koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan perumahan; 2. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
Program Lingkungan Sehat Pemukiman	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1. Fasilitasi pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat; 2. Sosialisasi dan koordinasi kebijakan perumahan.
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam atau Sosial	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan sosial
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1. Penyusunan, sosialisasi dan pengawasan kebijakan pence-gahan bahaya kebakaran; 2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Program Pengelolaan Area Pemakaman	1. Penyusunan kebijakan dan koordinasi pengelolaan area pemakaman; 2. Pembangunan dan pemeliha-raan sarana prasarana pemakaman

3. Urusan Penataan Ruang
   a. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang kabupaten;

b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial propinsi dan nasional; dan

c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Perencanaan Tata Ruang	1. Penyusunan, sosialisasi dan koordinasi kebijakan tata ruang daerah; 2. Peningkatan kapasitas aparat dalam perencanaan tata ruang.
Program Pemanfaatan Ruang	1. Penyusunan, sosialisasi dan koordinasi kebijakan peman-faatan ruang; 2. Peningkatan kapasitas aparat dalam pemanfaatan ruang.
Program Pengendalian Peman-faatan Ruang	Penyusunan sistem dan pengendalian pemanfaatan ruang

4. Urusan Perhubungan

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka membangun perekonomian, keandalan keselamatan, lingkungan, peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas dan pelayanan angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan sarana prasarana pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Pengadaan dan pengoperasian sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, pesisir, laut dan tanah);
b. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, industri dan masyarakat;
c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam;
e. Meningkatkan upaya mitigasi bencana dan mengelola resiko bencana;
f. Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan perkembangan sains dan teknologi;
g. Meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan; dan
h. Mencapai target luas kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penyusunan dan soialisasi kebijakan manajemen dan kerjasama pengelolaan persampahan;

	2. Penyediaan sarana prasarana dan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan; 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penciptaan sinergitas informasi dalam peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan upaya dan penerapan teknologi dalam pengendalian polusi

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Pengembangan ekowisata, jasa lingkungan dan konservasi kawasan laut dan hutan
Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Peningkatan usaha pengendalian kebakaran hutan
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen ekosistem pesisir dan laut
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Penyusunan, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

6. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

   Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia, sistem pembiayaan, dan peluang pasar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1. Penyusunan dan sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah; 2. Perencanaan, koordinasi, dan fasilitasi pengembangan pengembangan Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi usaha kecil menengah dan koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan; 2. Pengembangan dan peningkatan jaringan kerjasama Usaha Mikro Kecil Menengah.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian; 2. Koordinasi, sosialisasi dan pembinaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

Program Pengembangan dan Pengendalian Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Penanaman Modal	Peningkatan usaha pengembangan dan pengendalian Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan penanaman modal
Program Pengembangan dan Pengendalian Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Penanaman Modal	Penguatan kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

7. Urusan Ketahanan Pangan

   Meningkatkan ketahanan pangan

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	1. Pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan cadangan pangan; 2. Pengembangan sistem distribusi pangan yang efisien; 3. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal di masyarakat;

	4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai standar mutu pangan.

8. Urusan Pertanian

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Peningkatan kapasitas petani dan lembaga petani pelaku agribisnis/ agrobisnis; 2. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	1. Pengembangan desa mandiri pangan dan lumbung pangan desa; 2. Peningkatan mutu dan keamanan pangan; 3. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	1. Penelitian pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; 2. Peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1. Penelitian pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; 2. Peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1. Penyuluhan dan penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan; 2. Pengembangan dan sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak; 2. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat; 3. Penelitian dan penyuluhan gizi dan pakan ternak.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan; 2. Penelitian pengembangan dan penyuluhan kualitas dan teknis pemasaran produksi hasil peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna;

	2. Penelitian pengembangan dan penyuluhan teknologi peternakan tepat guna.

9. Urusan Kehutanan

   a. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan;

   b. Mengembangkan hutan rakyat;

   c. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan; dan

   d. Perencanaan dan pengembangan hutan kota.

   Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Optimalisasi upaya pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Penggalakan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan; 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta penebangan liar

Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan industri
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	1. Penyusunan, sosialisasi dan pengawasan kebijakan tentang pengelolaan industri hutan; 2. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan.
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Pengembangan dan pendampingan kelompok usaha hutan rakyat

10. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
    a. Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral;
    b. Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha; dan
    c. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.

    Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Penyusunan, sosialisasi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan pertambangan daerah

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Penurunan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan rakyat
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

11. Urusan Pariwisata

    Meningkatkan potensi dan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Kebumen.

    Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan upaya pengembang-an pemasaran pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Peningkatan sarana prasarana pariwisata; 2. Pengembangan daerah dan jenis obyek wisata daerah.
Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan dan pengembangan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata dan budaya

12. Urusan Kelautan dan Perikanan

    Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Peningkatan Kapasitas Kelautan dan Perikanan	Temu usaha dan fasilitasi pameran usaha hasil kelautan dan perikanan
Program Pembinaan dan Pengembangan Mutu Hasil Perikanan	1. Pendampingan kelompok usaha pengolahan hasil perikanan; 2. Gerakan gemar makan ikan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan/Pesisir	Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan/pesisir
Program Peningkatan Manajemen Usaha Kelautan dan Perikanan	Pendampingan pada kelompok usaha kelautan dan perikanan
Program Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Operasional dan rehabilitasi/ pemeliharaan laboratorium ikan
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pendampingan dan pembinaan budidaya perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perikanan tangkap; 2. Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap.
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dan budidaya ikan unggulan daerah
Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Alur Lalu Lintas Kapal Perikanan	Pemeliharaan, rehabilitasi dan operasioanal pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan
Program Peningkatan Produksi Benih Ikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi benih ikan

Misi keempat : Memperluas Jaringan Sosial Ekonomi Secara Nasional Maupun Internasional Demi Kesejahteraan Rakyat.

Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Urusan Ketenagakerjaan
   a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
   b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;

c. Memfasilitasi penciptaan lapangan pekerjaan;

d. Meningkatkan upah minimum dan perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah; 2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Penyusunan dan penyebar-luasan informasi bursa kerja; 2. Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan kerja.
Program Perlindungan Pengem-bangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja; 2. Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan.

2. Urusan Perdagangan

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang sertapengembangan pasar dalam dan luar negeri

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pengamanan perdagangan
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Peningkatan dan pengembangan kerjasama perdagangan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan dan pengembangan kegiatan/produk ekspor daerah
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1. Fasilitasi dan pengembangan perdagangan daerah; 2. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Penyuluhan, penataan, fasilitasi dan pengawasan pedagang kaki lima dan asongan

3. Urusan Industri

Meningkatkan daya saing industri unggulan daerah.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi	Peningkatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem produksi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah;
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan penggunaan teknologi industri
Program Penataan Struktur Industri	Penyusunan kebijakan penataan struktur dan penyediaan sarana kluster industri
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pembangunan akses transportasi dan penyediaan sarana informasi sentra-sentra industri potensial

4. Urusan Penanaman Modal
   a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjadikan investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah;
   b. Membentuk lembaga investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi; dan
   c. Meningkatkan mutu pelayanan perijinan yang mudah, tepat dan transparan.

Program-program pembangunan dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan antara lain :

PROGRAM	KEGIATAN INDIKATIF
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi daerah
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Penyusunan kajian potensi dan peta investasi daerah

BAB VIII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunan sampai Tahun 2015. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah. Hal ini mengingat rencana kinerja merupakan gambaran sosok tampilan Satuan Kerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang

Kinerja daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja daerah, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja daerah tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksana pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci penetapan indikator kinerja pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 menurut Urusan Wajib dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Cakupan pelayanan pendidikan usia dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
• Persentase penduduk yang selesai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.	
• Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti Pendidikan menengah. • Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi.	
• Tingkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur	

pendididkan formal/non formal.	
• Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun	
• Presentase penduduk miskin menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.	
• Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan formal .	
• Pemerataan Pendidikan .	
• Tingkat efektivitas manajemen berbasis sekolah jumlah anggaran pendidikan dari APBD	
• Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.	
• Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar 9 tahun.	
• Angka putus sekolah (APS) pada pendidikan sekolah dasar/sederajat.	
• Angka putus sekolah (APS) pada pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.	

2. Urusan Kesehatan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Umur harapan hidup.	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan PP dan KB
• Angka kematian bayi.	
• Angka kematian ibu melahirkan.	
• Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita.	

• Angka kasus anemia gizi besi pada ibu hamil.	
• Tingkat Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.	
• Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan	
• Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan.	
• Jumlah kasus penyakit menular.	
• Jumlah kasus penyakit malaria DBD	
• Tingkat prevalensi HIV/AIDs	
• Persentase perilaku hidup sehat.	
• atau rata-rata lamanya pasien dirawat (6-9 hari)	
• Akses penduduk terhadap sanitasi dasar.	
• Tingkat kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas.	
• Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.	
• Akses masyarakat kawasan perbatasan pada pelayanan kesehatan	
• Proporsi tenaga dokter di Puskesmas	
• Pemerataan tenaga kesehatan	
• Tingkat pelayanan kesehatan Ibu dan bayi*	
• Tingkat pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah	

• Cakupan peserta KB aktif	
• Cakupan pelayanan imunisasi	
• Cakupan pelayanan kesehatan jiwa	
• Cakupan pelayanan gawat darurat	
• Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB Paru, dan ISPA	
• Jumlah institusi binaan untuk pelayanan kesehatan lingkungan	
• *Bed Occupancy Rate* (BOR) atau angka penggunaan tempat tidur (60-80%)	
• *Average Length of Stay* (AVLOS)	
• *Turn Over Interval* (TOI) atau tenggang perputaran (1-3 hari)	
• *Net Death Rate* (NDR) atau angka kematian pasien keluar (kurang dari 25/1000)	
• Terealisasinya Rumah Sakit Umum Daerah Type B	

3. Urusan Pekerjaan Umum

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Tingkat aksesibilitas wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Badan
• Tingkat kondisi jaringan jalan	
• Tingkat resiko dan periode genangan banjir.	
• Jumlah kejadian bencana kekeringan.	

• Tingkat ketersediaan jaringan prasarana pengelolaan air baku.	Penanggulangan Bencana Daerah
• Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagi keperluan (rumah tangga, pemukiman, pertanian, industri).	
• Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air.	
• Tingkat pelayanan air minum.	
• Tingkat pengendalian pemanfaatan air tanah	
• Tingkat kesiagaan penanganan bencana alam.	

4. Urusan Perumahan Rakyat

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Luas dan sebaran kawasan kumuh.	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
• Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni	
• Tingkat kemampuan penyediaan prasarana dan sarana rumah.	
• Tingkat kemantapan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman.	
• Tingkat pelayanan air bersih.	
• Tingkat pelayanan sanitasi.	
• Tingkat pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah)	
• Tingkat kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	
• Tingkat ketersediaan sarana dan	

prasarana pemakaman.	

5. Urusan Penataan Ruang

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW-Kawasan Strategis-RDTR)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum
• Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar sub wilayah	
• Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
• Jumlah kerjasama Pembangunan antar Darah.	
• Tingkat Disparitas Pembangunan antar subwilayah	
• Tingkat kelengkapan rencana wilayah strategis	
• Tingkat kelengkapan rencana kawasan cepat tumbuh	
• Tingkat penanganan wilayah strategis.	
• Tingkat penanganan wilayah cepat	

tumbuh.	
• Tingkat penanganan perkembangan pusat-pusat kegiatan wilayah.	
• Tingkat kesesuaian antara perencanaan pusat kegiatan dengan perkembangan aktual.	
• Tigkat penerapan perencanaan partisipatif	
• Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	
• Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.	
• Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah.	
• Tingkat implementasi dukumen perencanaan daerah.	
• Kualitas pelaksanaan Musrenbang.	

7. Urusan Perhubungan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Tingkat Ketersediaan prasarana dan sarana / fasilitas perhubungan.	Dinas Perhubungan
• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana / fasilitas perhubungan.	
• Tingkat pelayanan prasarana dan fasilitas LLAJ.	
• Tingkat pelayanan prasarana angkutan umum	
• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan barang (darat, laut, udara).	

• Tingkat keselamatan/keamanan lalu lintas tranportasi darat	
• Tingkat kecelakaan lalu lintas transportasi.	

8. Urusan Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Tingkat pemanfaatan sumber daya alam.	Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas SDA ESDM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan
• Cakupan sistem pengelolaan persampahan.	
• Tingkat pencemaran lingkungan (air,tanah.udara).	
• Tingkat pelangggaran dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	
• Tingkat rehabilitasi/pemulihan sumber daya alam	
• Jumlah DAS berkondisi kritis.	
• Ketersediaan *early warning system*/pernyataan dini bencana.	

9. Urusan Pertanahan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Luas daerah yang telah tercakup dalam sistem pendaftaran tanah.	Sekretariat Daerah
• Cakupan informasi pertanahan.	
• Tingkat penerapan teknologi informasi pertanahan.	
• Jangka waktu penyelesaian administrasi pertanahan	
• Tingkat penyelesaian konflik-	

konflik pertanahan.	

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

INDIKATOR KINERJA	SKPD
Ada/tidaknya sistem administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak dan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
• Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI	
• Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	
• Akses perempuan terhadap pendidikan	
• Persentase penduduk perempuan berusia 10 th ke atas yang tidak/belum pernah sekolah	
• Persentase penduduk perempuan yang buta huruf	
• Akses perempuan terhadap layanan kesehatan	

• Angka Gender Empowerment Measurement (mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non-pertanian), politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer).	
• Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publiK	
• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	
• Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	
• Persentase perempuan dalam jabatan publik (PNS)	
• Jumlah (persentase) pekerja anak	
• Tingkat perlindungan perempuan	

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
• Tingkat/kualitas tumbuh kembang anak	
• Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong masyarakat miskin.	
• Laju pertumbuhan penduduk.	

• Tingkat kelahiran.	
• Tingkat pelayanan kontrasepsi.	
• Kapasitas Institusi daerah dalam pelaksanaan KB	

13. Urusan Sosial

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis dan PMKS, anak jalanan dan anak cacat	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
• Akses kepada pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin.	
• Jumlah tenaga pelayanan sosial untuk berbagi jenis kecacatan	
• Peluang mengakses pelayanan umum.	
• Persentase penurunan jumlah fakir miskin dan keluarga rentan sosial.	

14. Urusan Ketenagakerjaan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Tingkat pengangguran terbuka.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
• Jumlah pekerja formal perdesaan/perkotaan	
• Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif.	
• Tingkat kesempatan kerja.	
• Kapasitas balai latihan kerja.	

• Jumlah kasus pelanggaran/penyimpangan regulasi ketenagakerjaan.	
• Tingkat perkembangan transmigrasi.	
• Jumlah transmigrasi yg berhasil di mukimkan.	

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
• Tingkat kepastian usaha dan perlindungan hukum	
• Tingkat keterampilan SDM Usaha Mikro.	
• Akses ke sumber permodalan.	
• Kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha kecil.	

16. Urusan Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Laju pertumbuhan Investasi.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
▪ Ada/tidaknya sistem informasi penanaman modal	
▪ Jangka waktu pengurusan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis.	

17. Urusan Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Ketersediaan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal daerah.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
▪ Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.	

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Tingkat kualitas pemuda (15-35 tahun).	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Setda Kabupaten Kebumen
▪ *Sports Development Index* (SDI)	
▪ Prestasi olahraga dalam event-event internasional	
▪ Ada/tidaknya kebijakan pengelolaan prestasi olahraga daerah.	
▪ Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana olahraga	

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Tingkat ancaman konflik antar kelompok masyarakat.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja,
▪ Jumlah kasus pelanggaran perda	
▪ Jumlah kasus peredaran narkoba.	
▪ Tingkat pendidikan politik masyarakat.	

▪ Ada / tidaknya sistem penanggulangan korban bencana alam.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Tingkat kapasitas aparatur	DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKD, Inspektorat, Kecamatan dan Kelurahan
▪ Tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah.	
▪ Tingkat kapasitas pengelolaan keuangan daerah.	
▪ Tingkat profesionalisme dan kompetensi staf.	
▪ Jumlah kasus penyalagunaan wewenang.	
▪ Jumlah kasus KKN	
▪ Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat	
▪ Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah.	
▪ Jumah peraturan daerah yang disusun.	
▪ Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur	
▪ Tingkat ketrampilan dan aparatur.	
▪ Tingkat profesionalisme aparatur.	

21. Urusan Ketahanan Pangan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita	Kantor Ketahanan Pangan
▪ Penguatan cadangan pangan	
▪ Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	
▪ Stabilitas harga dan pasokan pangan	
▪ Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
▪ Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	
▪ Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan	
▪ Penanganan daerah rawan pangan	

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
▪ Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan.	
▪ Tingkat partisispasi masyarakat dalam pembangunan desa	
▪ Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan perdesaan.	

23. Urusan Statistik

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
▪ Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah.	

▪ Tingkat validitas dan kemutakhiran data dan informasi daerah.	
▪ Tingkat kemudahan akses informasi.	

24. Urusan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
▪ Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan.	
▪ Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian Dukomen arsip daerah.	
▪ Tingkat pelayanan informasi arsip daerah.	
▪ Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat.	

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah.	Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika

▪ Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	
▪ Tingkat kapasitas SDM bidang komonikasi dan informasi.	
▪ Akses masyarakat kepada informasi publik.	

26. Urusan Perpustakaan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Tingkat kemampuan pengelolaan kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
▪ Tingkat kualitas pelayanan kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan bagi kepentingan masyarakat	

Sedangkan penetapan indikator kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 menurut Urusan Pilihan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Dinas Pertanian dan Kehutanan

▪ Kualitas SDM pertanian di perdesaan	
▪ Cakupan bantuan beras bersubsidi pada keluarga miskin.	
▪ Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan.	
▪ Tingkat produksi padi/beras	
▪ Tingkat sarana hasil produksi pertanian	
▪ Cakupan lahan beririgasi	
▪ Kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai	
▪ Cakupan sistem penyuluhan	
▪ Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	
▪ Nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan	
▪ Tingkat infrastruktur pertanian perdesaan	

2. Urusan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Laju deforestasi	Dinas Pertanian dan Kehutanan
▪ Nilai tambah hasil hutan kayu	
▪ Nilai tambah hasil hutan non kayu	
▪ Cakupan sistem pengelolaan hutan	

yang berkelanjutan	
▪ Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang	

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Kontribusi sektor listrik, gas (dan air bersih) terhadap PDRB	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
▪ Ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	
▪ Ketersediaan system pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yg.berpotensi merusak lingkungan.	
▪ Cakupan pelayanan kelistrikan.	

4. Urusan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
▪ Tingkat perkembangan jumlah wisatawan.	
▪ Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata	

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
▪ Kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
▪ Tingkat perkembangan budidaya	

perikanan	
▪ Tingkat perkembangan perikanan tangkap	
▪ Tingkat pengelolaan produksi perikanan	
▪ Tingkat pemasaran produksi perikanan	

6. Urusan Perdagangan

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
• Ketersediaan program perlindungan konsumen	
• Jumlah kerjasama perdagangan internasional/regional.	

7. Urusan Industri

INDIKATOR KINERJA	SKPD
• Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
• Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah.	
• Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri.	
• Ketersediaan kebijakan pengelolaan sentra-sentra industri potensial.	

8. Urusan Ketransmigrasian

INDIKATOR KINERJA	SKPD

• Tingkat perkembangan transmigrasi.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
• Jumlah transmigrasi yang berhasil di mukimkan.	

BAB IX
PENUTUP

A. Pedoman Transisi

RPJM Daerah menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015. Namun secara substansial juga berlaku sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2016. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJM Daerah ini berakhir, untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Daerah dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah periode berikutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Daerah dengan Renstra SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Daerah, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM Daerah ke dalam Renstra SKPD;

5. Keberhasilan pelaksanaan RPJM Daerah ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya aparatur dan sumber pendanaannya serta komitmen pemangku kepentingan; dan
6. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RPJM Daerah ini perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Desember 2010
BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 17